

# KINERJA BPOM DALAM ANGKA TRIWULAN III TAHUN 2020





**BADAN POM**

**KINERJA BPOM**

DALAM ANGKA TRIWULAN III TAHUN 2020

# SAMBUTAN KEPALA BPOM RI

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat Rahmad dan RidhoNya sehingga BPOM dapat terus hadir melayani dan melindungi masyarakat melalui jaminan obat dan makanan yang aman, berkualitas/bermanfaat, dan bermutu. Kinerja BPOM sampai dengan Triwulan III Tahun 2020 dituangkan dalam “**Kinerja BPOM Dalam Angka**”. Buku ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban BPOM dalam pelaksanaan anggaran pemerintah dan juga sumber informasi tentang hasil - hasil Pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam buku ini disampaikan hasil pengawasan Obat dan Makanan baik yang dilakukan BPOM sendiri maupun bermitra dengan pemangku kepentingan yang mencakup standardisasi, evaluasi *pre-market*, hingga pengawasan *post-market* yang disertai upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat.

Pada tahun 2020 ini pandemi COVID 19 yang melanda dunia mampu mengubah hampir seluruh tatanan kehidupan dan kebiasaan kita. Tidak terkecuali juga dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2020, beberapa kinerja yang telah dicapai Badan POM diantaranya adalah penerbitan 115.984 NIE, pemeriksaan di 20.352 sarana produksi dan sarana distribusi, pengujian 39.069 sampel, 151 perkara, dan 44 kegiatan pelaksanaan KIE.

Terima kasih kepada seluruh jajaran BPOM serta mitra kerja atas kinerja yang dicapai sampai dengan Triwulan III Tahun 2020. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua mitra kerja BPOM sebagai bahan evaluasi bagi pelaksana kegiatan agar terus berupaya bersama meningkatkan kinerja pada masa mendatang, dalam upaya melayani dan melindungi masyarakat.

Jakarta, 11 Desember 2020  
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan,



Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP



# DAFTAR ISI

<b>SAMBUTAN KEPALA BPOM R.I.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>HIGHLIGHT.....</b>	<b>1</b>
<b>HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN .....</b>	<b>4</b>
I. Hasil Pengawasan Keamanan, Khasiat dan Mutu Produk Obat dan Makanan.....	5
II. Standardisasi.....	13
III. Riset dan Kajian di Bidang Obat dan Makanan.....	15
IV. Pemberdayaan Mitra Kerja dan Masyarakat.....	16
V. Digitalisasi Pelayanan Publik.....	19
VI. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan.....	21
VII. Penguatan dan Penataan Organisasi dan Tata Laksana serta Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ..	23
VIII. Layanan Advokasi Hukum (Pelayanan Hukum).....	27
IX. Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri.....	28
X. Pengelolaan Anggaran.....	30
XI. Pemantauan Capaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) BPOM .....	30
<b>PENUTUP .....</b>	<b>30</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>31</b>

# DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.</b>	Profil Registrasi Obat dan Makanan s.d. Triwulan III Tahun 2020 .....	5
<b>Gambar 2.</b>	Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan Sebelum Beredar/ Dipublikasikan s.d. Triwulan III Tahun 2020.....	5
<b>Gambar 3.</b>	Profil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan s.d. Triwulan III Tahun 2020.....	6
<b>Gambar 4.</b>	Profil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan s.d. Triwulan III Tahun 2020.....	6
<b>Gambar 5.</b>	Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan (Targeted) s.d. Triwulan III Tahun 2020.	7
<b>Gambar 6.</b>	Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan (Random) s.d. Triwulan III Tahun 2020 .	7
<b>Gambar 7.</b>	Profil Sertifikasi Obat dan Makanan s.d. Triwulan III Tahun 2020.....	8
<b>Gambar 8.</b>	Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan s.d. Triwulan III Tahun 2020.....	8
<b>Gambar 9.</b>	Profil Pengawasan Label Obat dan Makanan s.d. Triwulan III Tahun 2020.....	9
<b>Gambar 10.</b>	Profil Laporan Efek Samping s.d. Triwulan III tahun 2020 .....	9
<b>Gambar 11.</b>	Perkembangan Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan Seluruh Indonesia (Januari - September 2020).....	10
<b>Gambar 12.</b>	Grafik Pemberian Pelayanan Informasi Kepada Media Periode Januari - September 2020..	15
<b>Gambar 13.</b>	Persentase Pelaksanaan Wawancara Langsung dan Jawaban Tertulis Kepada Media Periode Januari – September 2020 .....	15
<b>Gambar 14.</b>	Pertumbuhan Audience Media Sosial Badan POM Triwulan III Tahun 2020.....	16
<b>Gambar 15.</b>	Total Engagement Media Sosial Badan POM Triwulan III Tahun 2020.....	16
<b>Gambar 16.</b>	Top engagement content pada platform <i>Facebook</i> Triwulan III Tahun 2020.....	16
<b>Gambar 17.</b>	Top engagement content pada platform <i>Instagram</i> Triwulan III Tahun 2020.....	16
<b>Gambar 18.</b>	Jumlah Pemberitaan tentang Badan POM Periode Januari - September 2020 .....	17
<b>Gambar 19.</b>	Diagram Sebaran Pemberitaan Badan POM di Media Periode Januari - September 2020...	17



BADAN POM

# HIGHLIGHT

s.d. TRIWULAN III TAHUN 2020

# Generasi Muda Hebat, Berantas Penyalahgunaan Obat



Jakarta / Selasa (14/07/2020)

Dalam rangka terus membangun masyarakat menjadi konsumen cerdas dalam memilih obat, Badan POM menyelenggarakan kegiatan Komunikasi, Edukasi dan Informasi (KIE) “Generasi Muda Produktif, Cerdas Dan Tolak Penyalahgunaan Obat Di Era New Normal secara virtual. Acara yang dibuka oleh Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito bersama Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Rita Endang ini menghadirkan Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Baby Siti Salamah sebagai narasumber. Diikuti lebih dari 4000 orang generasi milenial dari seluruh wilayah Indonesia, termasuk generasi muda dari Balai Besar/Balai POM dan Kantor Badan POM di Kabupaten/Kota, acara ini juga dihadiri selebriti Danar Wicaksono, Bimbim Slank, dan Jerome Polin Sijabat.

## Minimalisir Potensi Penyalahgunaan Obat Daring, Badan POM Gelar Sosialisasi Peraturan Nomor 8 Tahun 2020

Jakarta/ Selasa (28/07/2020)

Menanggapi maraknya penjualan obat secara daring, Badan POM gelar sosialisasi peraturan Badan POM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat yang Diedarkan Secara Daring. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara tatap muka dan daring melalui aplikasi *zoom*, dengan peserta kurang lebih 300 orang ini dihadiri juga oleh perwakilan dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI), *International Pharmaceutical Manufacturers Group* (IPMG), dan *Indonesian E-Commerce Association* (idEA). Kegiatan ini diselenggarakan untuk membahas pengawasan yang dibutuhkan demi mencegah potensi yang tidak diinginkan.



## Badan POM dan SFDA Perkuat Kerja Sama di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Jakarta / Kamis (13/08/2020)

Untuk memperkuat kerja sama di antara Otoritas Regulator Obat dan Makanan Indonesia dan Arab Saudi, Badan POM dan SFDA menandatangani *Memorandum of Understanding (MoU)* tentang Pengawasan, Kualitas, dan Keamanan Pangan dan Produk Obat. MoU ditandatangani secara *desk to desk* oleh H.E. Prof. Hisham bin Saad Aljadhey, CEO SFDA di Riyadh dan Penny K. Lukito, Kepala Badan POM RI di Jakarta. MoU ini memiliki arti penting dan historis yang menandai secara resmi dimulainya kerja sama di bidang Obat dan Makanan diantara Otoritas Regulator Obat dan Makanan Indonesia dan Arab Saudi.



## Dukungan Badan POM Untuk Penelitian dan Pengembangan Obat COVID-19

Jakarta / Rabu (19/08/2020)

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa bersama Wakapolri dan Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN), serahkan laporan hasil uji klinik obat kombinasi baru untuk COVID-19 hasil kerja sama TNI AD, BIN dan Universitas Airlangga (UNAIR) kepada Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito. Hasil uji klinik tersebut, akan dilakukan evaluasi untuk dapat disimpulkan apakah valid atau tidak dan mengetahui apakah obat kombinasi tersebut lebih baik daripada obat standar yang digunakan.



## Kolaborasi Badan POM – OKI Tingkatkan Kapasitas Regulator dan Industri Farmasi dalam Penanganan Pandemi COVID-19



### Jakarta / Kamis (03/09/2020)

Badan POM inisiasi pelaksanaan pertemuan teknis antara *National Medicines Regulatory Authorities* (NMRAs) dan Industri Obat dan Vaksin di negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dengan fokus terkait upaya penanganan Pandemi COVID-19. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito dalam *Focus Group Discussion* (FGD) Kolaborasi Obat dan Vaksin dalam Perspektif Kerja Sama Negara-Negara OKI: “Dukungan Otoritas Regulator dalam Mendorong Kolaborasi dan Kerja Sama Obat dan Vaksin di Negara-Negara OKI” yang diselenggarakan di Jakarta,

## Badan POM Intensifkan Penindakan Obat dan Makanan Ilegal Di Tengah Pandemi COVID-19

### Jakarta / Jumat (25/09/2020)

Badan POM menggelar konferensi pers secara virtual mengenai hasil operasi penindakan Obat dan Makanan di wilayah Bekasi. Penindakan ini didasarkan oleh penyelidikan secara mendalam oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan POM yang bersinergi dengan Bareskrim POLRI pada Rabu (23/09) terhadap sebuah ruko yang berlokasi di Bekasi. Dalam penindakan tersebut PPNS Badan POM berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 60 item (55 item obat tradisional ilegal dan 5 item pangan olahan ilegal) atau 78.412 pcs dengan perkiraan nilai keekonomian temuan mencapai Rp3.244.494.000,-. Selain itu PPNS Badan POM telah memeriksa enam orang saksi dan tersangka dalam proses pengumpulan bahan keterangan.





**BADAN POM**

# **HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN**

s.d. TRIWULAN III TAHUN 2020

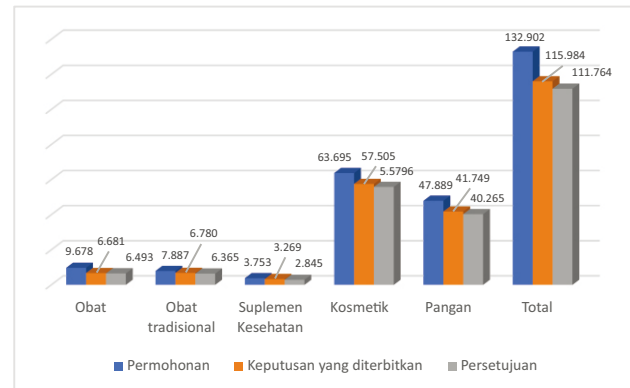
# I. Hasil Pengawasan Keamanan, Khasiat dan Mutu Obat dan Makanan

## Pengawasan *pre-market*

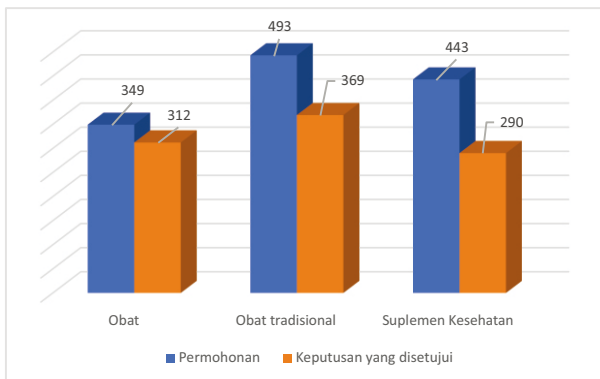
Sebelum Obat dan Makanan diproduksi atau diimpor dan diedarkan di wilayah Republik Indonesia, Obat dan Makanan harus melalui registrasi oleh BPOM untuk dievaluasi terkait aspek keamanan, khasiat dan mutu serta informasi melalui penandaan/label.



Sampai dengan Triwulan III tahun 2020, telah diterbitkan **115.984** keputusan dan **111.764** persetujuan izin edar dari **132.902** berkas permohonan registrasi Obat dan Makanan.



Gambar 1. Profil Registrasi Obat dan Makanan s.d. Triwulan III Tahun 2020



Gambar 2. Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan Sebelum Beredar/ Dipublikasikan s.d. Triwulan III Tahun 2020



Untuk melindungi masyarakat dari klaim yang menyesatkan, BPOM telah melakukan evaluasi rancangan iklan terhadap kebenaran klaim iklan khusus obat bebas, obat bebas terbatas, obat tradisional dan suplemen kesehatan yang telah mendapatkan ijin edar sebelum ditayangkan atau diedarkan. **Sampai dengan Triwulan III tahun 2020, dari 1.285 permohonan persetujuan rancangan iklan, telah disetujui 971 (75,56%) iklan.**

# Pengawasan *post-market*

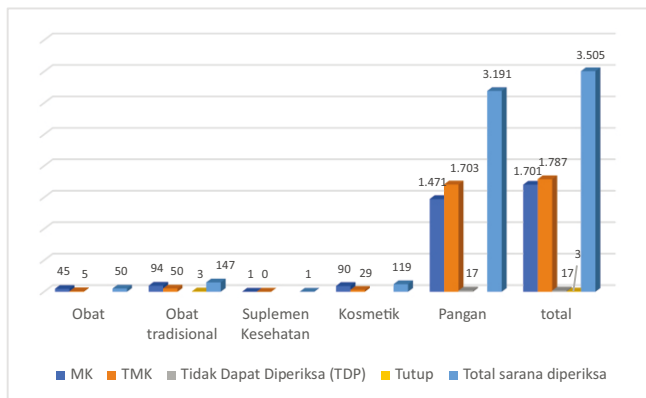
Pengawasan *post-market* dilakukan setelah produk beredar untuk memastikan bahwa Obat dan Makanan yang beredar aman, berkhasiat dan bermutu serta informasi produk sesuai dengan yang disetujui, dilakukan melalui :

## 1 Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi

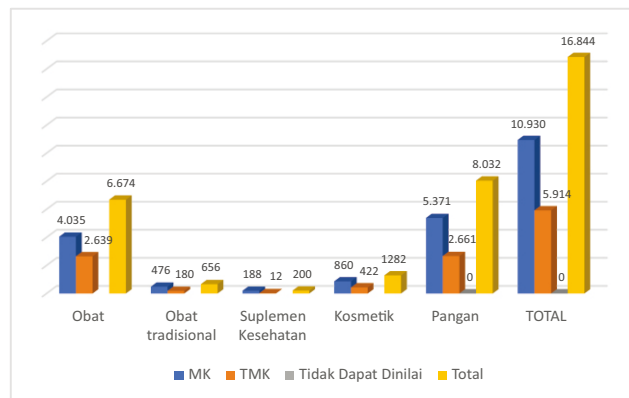
B POM melakukan pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan untuk menjamin kepatuhan implementasi Cara Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan Yang Baik.

Sampai dengan Triwulan III tahun 2020 telah diperiksa sebanyak **3.505 sarana produksi** Obat dan Makanan dengan **1.787 (50,94%)** sarana adalah TMK.

Sampai dengan Triwulan III tahun 2020 telah diperiksa **16.844 sarana distribusi** Obat dan Makanan dengan **5.914 (35,11%)** sarana adalah TMK.



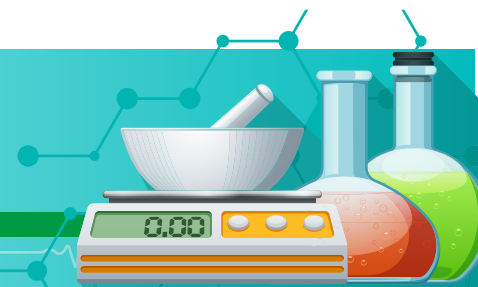
Gambar 3. Profil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan s.d. Triwulan III tahun 2020



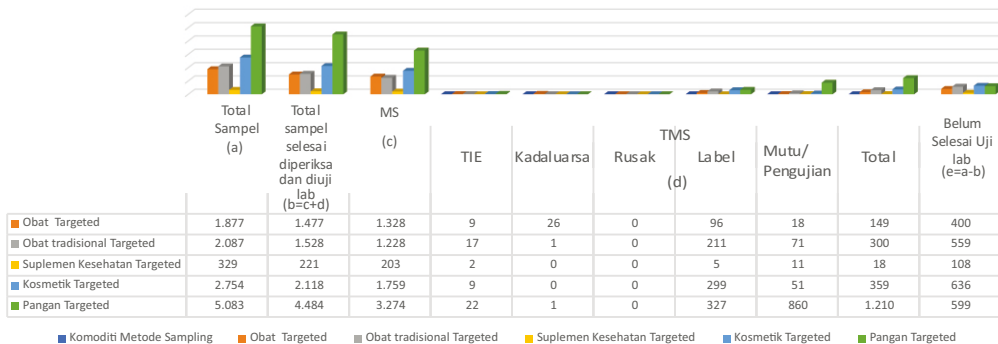
Gambar 4. Profil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan s.d. Triwulan III tahun 2020

Keterangan:

MK = Memenuhi Ketentuan  
TMK = Tidak Memenuhi



A. Targeted

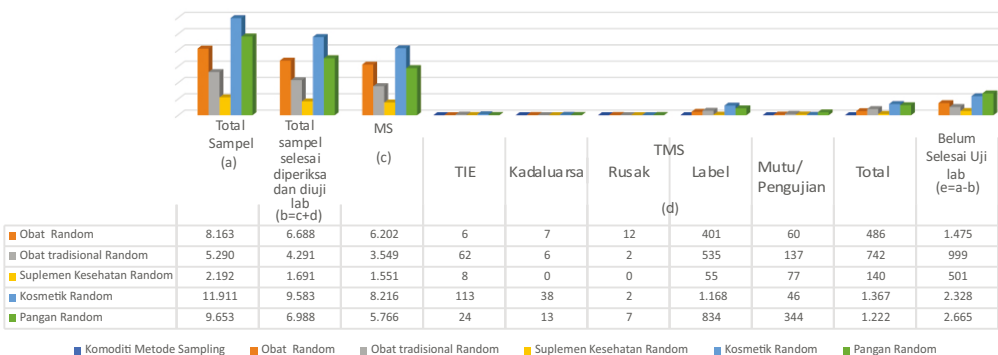


Keterangan:  
 MS = Memenuhi Syarat  
 TMS = Tidak Memenuhi Syarat  
 TIE = Tanpa Izin Edar

Gambar 5. Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan (Targeted) s.d. Triwulan III tahun 2020

Sampai dengan Triwulan III tahun 2020, dari 12.130 sampel targeted yang disampling terdapat 9.828 sampel yang selesai diperiksa dan diuji laboratorium, dimana 7.792 (79,28%) sampel memenuhi syarat.

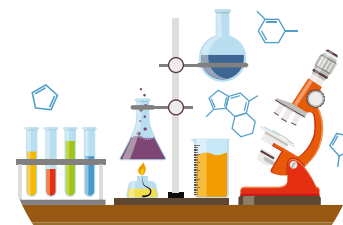
B. Random / Acak



Keterangan:  
 MS = Memenuhi Syarat  
 TMS = Tidak Memenuhi Syarat  
 TIE = Tanpa Izin Edar

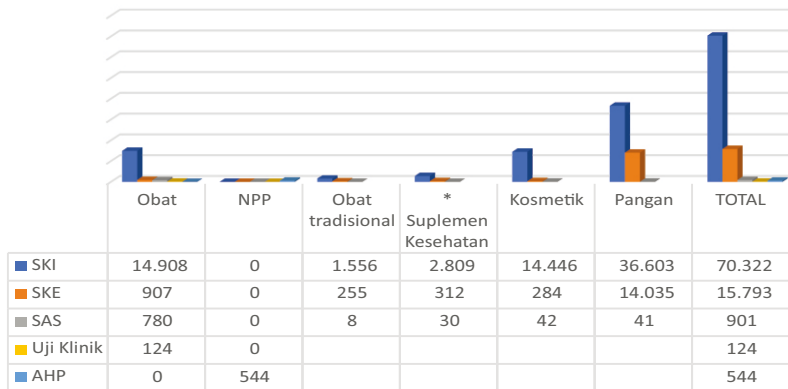
Gambar 6. Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan (Random) s.d. Triwulan III tahun 2020

Sampai dengan Triwulan III tahun 2020, dari 37.209 sampel random yang disampling terdapat 29.241 sampel yang selesai diperiksa dan diuji laboratorium, dimana 25.284 (86,47%) sampel memenuhi syarat.



\* Sumber data Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK)

Dalam rangka mendorong ekspor dan impor pengawasan Produk dan Bahan Baku yang masuk ke wilayah Indonesia, BPOM mengeluarkan Surat Keterangan Impor (SKI) dan Surat Keterangan Ekspor (SKE), SAS (*Special Access Scheme*), Uji Klinik, dan AHP (Analisa Hasil Pengawasan) Obat dan Makanan. Sampai dengan **Triwulan III tahun 2020** telah diterbitkan **70.322 SKI**, **15.793 SKE**, **901 SAS**, **124 Uji Klinik**, dan **544 AHP** Obat dan Makanan.

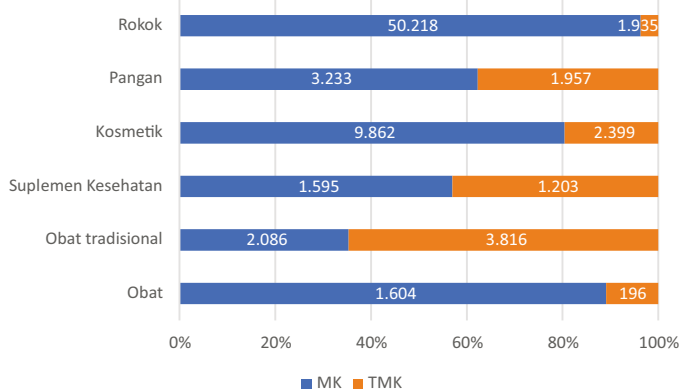


\* Termasuk Kuasi

Gambar 7. Profil Sertifikasi Obat dan Makanan s.d. Triwulan III tahun 2020

## Pengawasan Iklan

4



Untuk mencegah masyarakat mendapatkan informasi yang salah dan menyesatkan tentang produk Obat dan Makanan, BPOM melakukan pengawasan iklan produk di beberapa jenis media antara lain media cetak, televisi, radio, luar ruang dan *leaflet*/brosur. **Sampai dengan Triwulan III tahun 2020, dari 80.104 iklan Obat dan Makanan yang diawasi, 68.598 (85,64%) iklan memenuhi ketentuan.**

Gambar 8. Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan s.d. Triwulan III tahun 2020



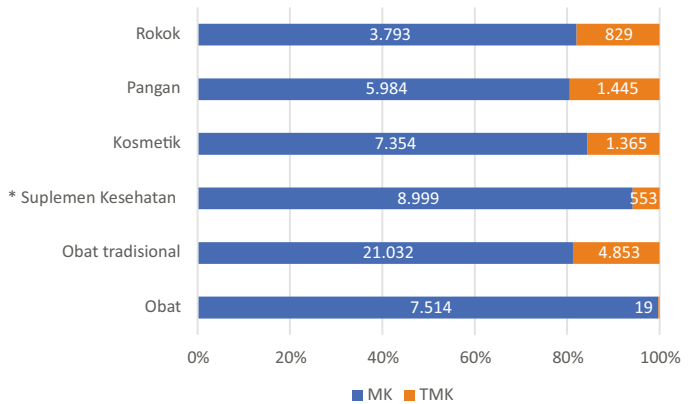
BPOM juga mengawasi kesesuaian label produk Obat dan Makanan yang beredar dengan yang telah disetujui BPOM, agar tidak memberikan informasi yang salah dan menyesatkan kepada masyarakat. **Sampai dengan Triwulan III tahun 2020, dari 63.740 label Obat dan Makanan yang diawasi, 54.676 atau sekitar**

**85,78% label memenuhi ketentuan.**

\* Termasuk Kuasi

## 5

## Pengawasan Label



Gambar 9. Profil Pengawasan Label Obat dan Makanan s.d. Triwulan III tahun 2020

## 6

## Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Monitoring Efek Samping Obat Tradisional (MESOT), Monitoring Efek Samping Suplemen Kesehatan (MESSK), Monitoring Efek Samping Kosmetik (MESKOS)

Penggunaan Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik oleh berbagai kalangan masyarakat, maka resiko timbulnya efek yang tidak diinginkan tetap ada. Oleh karena itu, BPOM melakukan evaluasi aspek keamanan produk yang beredar terhadap seluruh laporan efek samping yang diterima dari masyarakat dan/atau tenaga kesehatan, dengan membentuk Tim/Panitia

- MESO, MESOT, dan MESSK terdiri dari ahli farmakologi/farmakologi klinik dan beberapa tenaga ahli lainnya.
- MESKOS terdiri dari dokter spesialis kulit.



	Jumlah Laporan	Jumlah laporan Tindaklanjuti	Persentase (%)
Obat	4.688	3.476	74,15
Obat Tradisional	83	83	100,00
Suplemen Kesehatan	16	16	100,00
Kosmetik	383	323	84,33

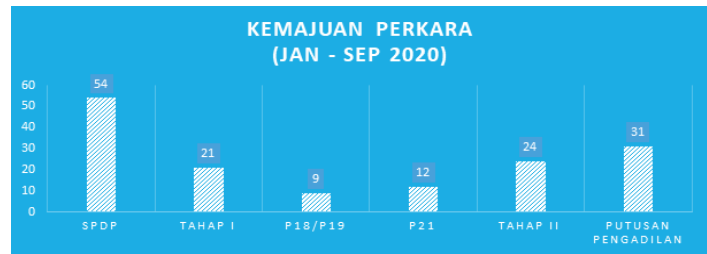
Gambar 10. Profil Laporan Efek Samping s.d Triwulan III tahun 2020



## Hasil Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan

Dalam rangka memberantas dan menertibkan peredaran produk Obat dan Makanan ilegal termasuk palsu serta obat keras disarana yang tidak berwenang, Badan POM secara terus menerus melakukan investigasi awal dan penyidikan kasus tindak pidana di bidang Obat dan Makanan. Upaya ini dilakukan secara mandiri maupun bersinergi dengan instansi penegak hukum lainnya (dalam kerangka Operasi Gabungan Nasional dan Operasi Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal).

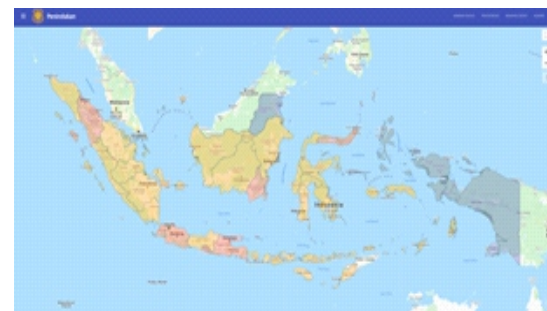
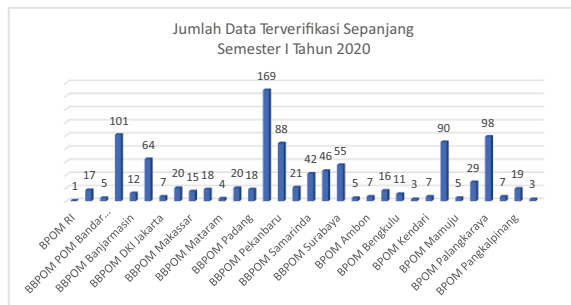
Sampai dengan Triwulan III tahun 2020, PPNS Badan POM telah menindaklanjuti perkara sebanyak 151 perkara. Adapun sebanyak 54 perkara masih dalam tahap SPDP, 21 perkara pada Tahap I, 9 perkara pada tahap P18/P19, 12 perkara pada tahap P21, 24 perkara sudah penyerahan tersangka dan barang bukti kepada JPU (Tahap 2), dan 31 perkara yang sudah mendapatkan putusan pengadilan.



Gambar 11. Perkembangan Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan Seluruh Indonesia (Januari - September 2020)

## Peta Rawan Kasus

Wujud pelaksanaan fungsi pencegahan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, BPOM menyusun peta berbasis aplikasi yang menggambarkan potensi atau kerawanan kasus Obat dan Makanan di setiap wilayah Indonesia berdasarkan data hasil pengawasan dan penindakan Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia, hasil pemberian bantuan pengujian sampel dan/atau keterangan ahli kepada Penyidik Polri, hasil tukar menukar informasi dengan lintas sektor terkait, dan hasil monitoring terhadap isu-isu adanya wilayah rawan kasus obat dan makanan di seluruh Indonesia. Nilai data yang dihasilkan peta rawan kasus bersifat aktual dan dapat dijadikan sebagai salah satu dasar dalam pengambilan kebijakan khususnya pada bidang penindakan agar lebih valid, terarah, dan terukur. Peta rawan kasus ini dapat diakses melalui URL: [www.penindakan.pom.go.id](http://www.penindakan.pom.go.id). Adapun data yang telah dilakukan verifikasi sepanjang Semester I Tahun 2020 (1 Januari 2020 s.d 30 Juni 2020) adalah sebanyak 1023 data dengan rincian sebagai berikut:



Peta Rawan Kasus Skala Nasional Semester I Tahun 2020

Peta rawan kasus skala nasional ditampilkan dalam bentuk zonasi berdasarkan komoditi yang dominan pada masing-masing provinsi dengan legend warna yang digunakan adalah Merah (Obat), Hijau (Obat Tradisional), Kuning (Kosmetika), Biru (Pangan Olahan), dan Cokelat (Suplemen Kesehatan). Berdasarkan Gambar 1 di atas, dapat dilihat pada tingkat provinsi wilayah kerawanan didominasi oleh komoditi kosmetika, dengan rincian kerawanan wilayah untuk tiap komoditi sebagai berikut:

a. Obat

Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Gorontalo, dan Sulawesi Utara.

b. Obat Tradisional

N/A.

c. Kosmetika

Aceh, Riau, Kep. Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan Lampung, Kep. Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Bali, NTB, NTT, Maluku, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah.

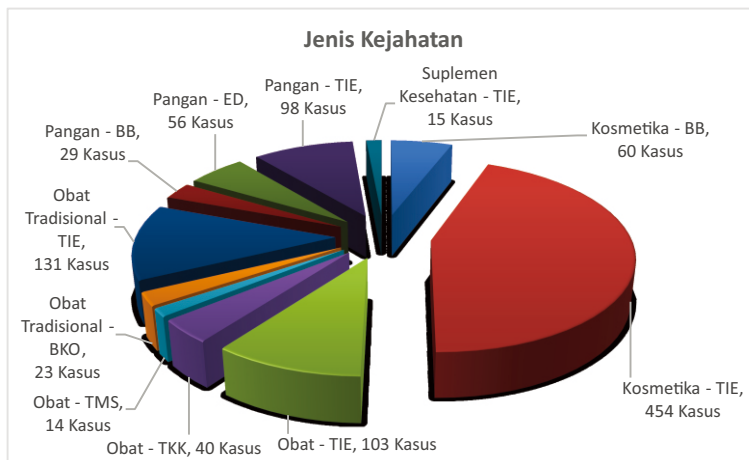
d. Pangan Olahan

Kalimantan Utara, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat

e. Suplemen Kesehatan

N/A.

Selain data kerawanan wilayah, pada peta rawan kasus juga dapat diperoleh data kasus dan potensi kerawanan kasus yang terjadi di seluruh Indonesia, sebagai berikut:

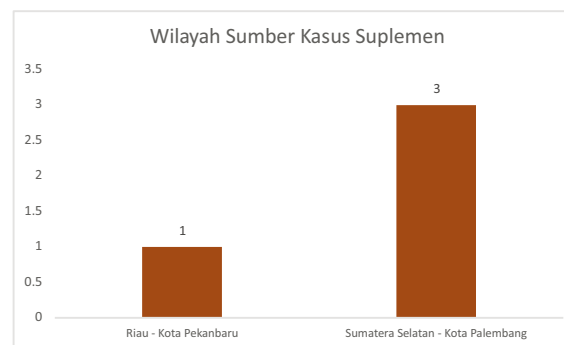
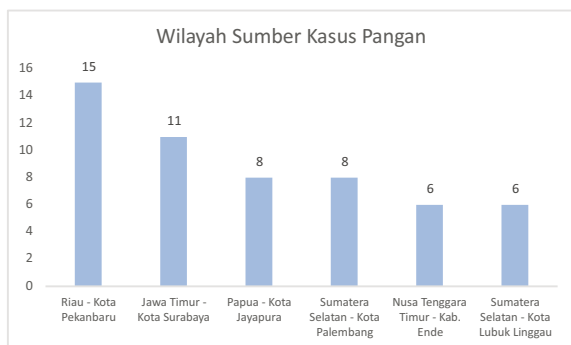
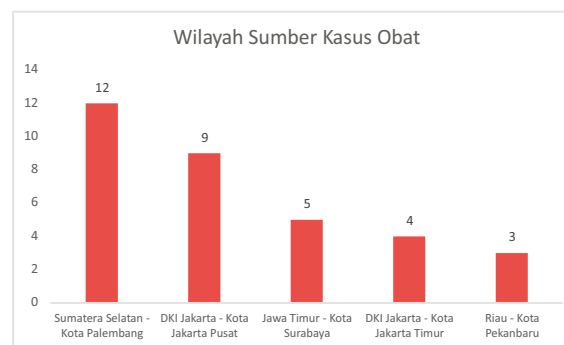
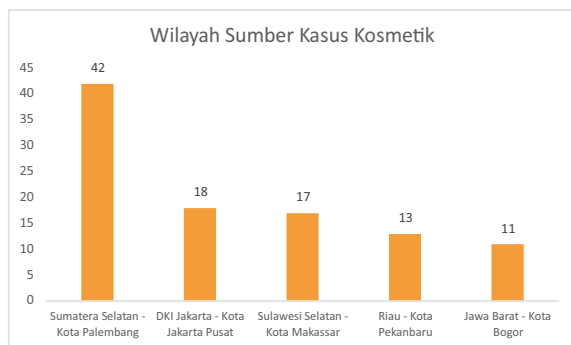
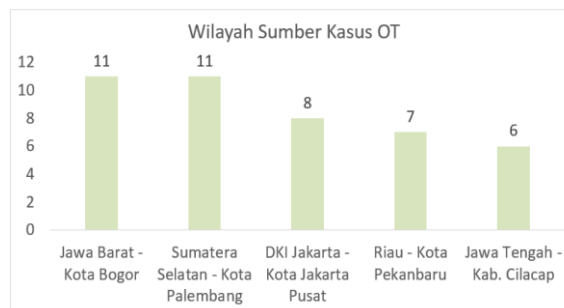


**Data Jenis Kejahatan dan Kasus Semester I Tahun 2020**

Dari Gambar di atas dapat dilihat bahwa data kasus yang mendominasi sampai dengan triwulan II tahun 2020 adalah kasus kosmetika TIE (Tanpa Izin Edar) sebanyak 454 kasus, diikuti oleh Obat Tradisional TIE (131 kasus), Obat TIE (103 kasus), dan Pangan TIE (98 kasus). Data ini sesuai dengan data kerawanan wilayah yang ditampilkan pada Gambar 1 dimana kosmetika merupakan komoditi yang mendominasi wilayah kerawanan pada skala nasional.

Data lain yang dapat tergambar dari peta rawan kasus adalah wilayah yang teridentifikasi sebagai sumber bagi wilayah lainnya per masing-masing komoditi. Data ini bisa dijadikan sebagai basis data wilayah yang dijadikan sumber dalam melakukan penindakan dan/atau pengawasan di lapangan. Berikut wilayah-wilayah yang teridentifikasi sebagai wilayah sumber:

10 BESAR WILAYAH SUMBER	
Wilayah Sumber	Jumlah
Sumatera Selatan	88
DKI Jakarta	56
Riau	46
Jawa Timur	43
Jawa Barat	43
Jawa Tengah	29
Sulawesi Selatan	27
Nusa Tenggara Timur	19
Sumatera Utara	18
Bali	16



Grafik Wilayah Sumber Per Komoditi

## II. Standardisasi

Dalam rangka mengawal mutu Obat dan Makanan, telah disusun standar/regulasi/pedoman di Bidang Obat dan Makanan.



### Obat

Telah disusun 12 (dua belas) peraturan/standar/pedoman obat yang masih dalam progres. Berikut 12 (dua belas) peraturan/standar/pedoman obat tersebut:

1. Revisi Peraturan BPOM No. 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengawasan Periklanan Obat (100%).
2. Revisi Peraturan BPOM No.33 Tahun 2018 tentang Penerapan 2D Barcode dalam Pengawasan Obat dan Makanan (85,71%).
3. Revisi Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tata Cara Sertifikasi CDOB (100%).
4. Revisi Peraturan BPOM No. 4 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (42,86%).
5. Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat (100%).
6. Revisi Peraturan Kepala BPOM No. HK.00.05.1.3682 Tahun 2005 tentang Tata Laksana Uji Bioekivalensi (22,22%).
7. Revisi Peraturan Kepala BPOM No. HK.03.1.23.12.11.10690 Tahun 2011 tentang Penerapan Farmakovigilans Bagi Industri Farmasi (33,33%).
8. Revisi PerBPOM No. 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Obat dan Bahan Obat (25,87%).
9. Penyusunan Standar Obat Non Kompendial (100%).
10. Penyusunan Suplemen I Farmakope Indonesia Edisi VI (Revisi) (90%).
11. Penyusunan Standar Mutu Produk Biologi (Revisi) (83,33%).
12. Informatorium Obat COVID-19 di Indonesia (100%).



### Obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan

Telah disusun 9 (sembilan) peraturan/standar/pedoman obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan, yang masih dalam progres. Berikut 9 (sembilan) peraturan/standar/pedoman tersebut:

1. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Pedoman Uji Toksisitas Non Klinik Secara In Vivo (Revisi Lampiran Peraturan Kepala Badan POM Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Uji Toksisitas Non Klinik Secara In Vivo) (80%).
2. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Persyaratan Teknis CPOTB (Revisi Lampiran Peraturan Kepala Badan POM Nomor Hk.03.1.23.06.11.5629 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis CPOTB (100%).
3. Pedoman Uji Klinik Obat Herbal (90%).
4. Rancangan Peraturan badan POM tentang Pola Tindak Lanjut Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (60%).
5. Pedoman Clustering Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (60%).
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Tata Cara Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB) (80%).
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Klaim Kosmetika (60%).
8. Keputusan Kepala Badan POM tentang Penetapan Vitamin D 1000 IU sebagai Suplemen Kesehatan (100%).
9. Keputusan Kepala Badan POM tentang Penetapan Bentuk Sediaan Kosmetika (100%).

Target jumlah kajian obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2020 adalah sebanyak 32 (tiga puluh dua) kajian, yang terdiri dari 12 (duabelas) kajian di bidang Obat Tradisional, 10 (sepuluh) kajian di bidang suplemen kesehatan dan 10 (sepuluh) kajian di bidang Kosmetik. Pada Triwulan III ini telah diselesaikan sebanyak 80 kajian yang terdiri dari 43 (empat puluh tiga) kajian di bidang Obat Tradisional, 25 (dua puluh tujuh) kajian di bidang Suplemen Kesehatan dan 12 (dua belas) kajian di bidang Kosmetik. Penyusunan kajian dilakukan berdasarkan permohonan yang masuk. Jumlah kajian yang telah terselesaikan melebihi dari target karena pada masa pandemi saat ini kajian dilakukan secara daring, pembiayaan menjadi lebih sedikit, waktu pembahasan dengan narasumber menjadi lebih mudah dan fleksible sehingga kajian lebih cepat terselesaikan.



## Pangan

Telah disusun 10 (sepuluh) peraturan/standar/pedoman pangan olahan, yang masih dalam progres. Berikut 10 (sepuluh) peraturan/standar/pedoman tersebut:

1. Rancangan Revisi Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2016 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol (70%).
2. Rancangan Revisi Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.11.11.09657 Tahun 2011 tentang Persyaratan Penambahan Zat Gizi dan Zat Non Gizi pada Pangan Olahan (70%).
3. Rancangan Revisi Peraturan Kepala BPOM Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pangan Steril Komersial (Pangan Berasam Rendah) (70%).
4. Rancangan Revisi Peraturan Kepala BPOM Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengawasan Klaim Label dan Iklan Pangan Olahan (70%).
5. Rancangan Revisi Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2019 tentang Informasi Nilai gizi pada Label Pangan Olahan (untuk ING UMK dan takaran saji kurang dari ½ saji atau berat bersih kecil) (70%).
6. Rancangan Revisi Peraturan Kepala Badan POM tentang Persyaratan Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Perisa (70%)
7. Pedoman Pelabelan Pangan: Umum (70%).
8. Pedoman Bahan Baku (70%).
9. Pedoman Akrilamida (70%).
10. Pedoman Implementasi Peraturan Kemasan Pangan (70%).

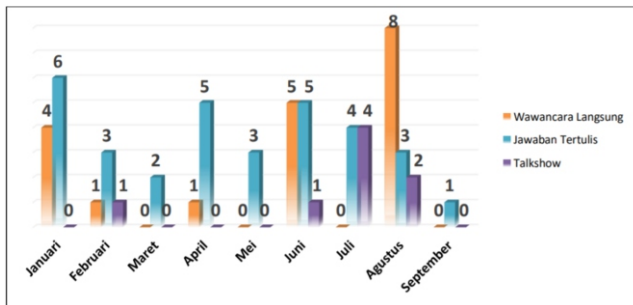
Target jumlah kajian pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2020 adalah sebanyak 200 (dua ratus) kajian. Pada Triwulan III ini telah diselesaikan sebanyak 125 (seratus dua puluh lima). Penyusunan kajian dilakukan berdasarkan permintaan dari stakeholder.

### III. Riset dan Kajian di Bidang Obat dan Makanan

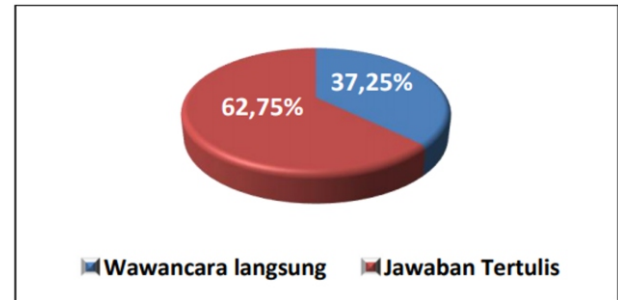
Riset dan Kajian Obat dan Makanan dilakukan untuk mendukung pengambilan keputusan dan dasar penyusunan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan, selain itu data hasil riset dan kajian yang berupa informasi dan rekomendasi juga dimanfaatkan untuk mengetahui dan meningkatkan efektifitas implementasi kebijakan pengawasan Obat dan Makanan. Pada tahun 2020 terdapat 7 topik riset dan kajian prioritas yang dilaksanakan BPOM antara lain:

1. Kajian Peredaran Obat-Obatan yang sering disalahgunakan (70%).
2. Pengukuran IKU BPOM 2020 (66%).
3. Kajian Keamanan Pangan (INARAC) (70%).
4. Survey Persepsi Lintas Sektor terhadap Program Keamanan Pangan Nasional (65%).
5. Riset Tingkat Pemahaman Pelaku Usaha Terhadap Proses Registrasi Pangan Olahan (81%).
6. Kajian Peningkatan Efektifitas Implementasi CPOTB bertahap oleh UMKM OT (68%).
7. Kajian Implementasi Inpres no.3 tahun 2017 dalam pengawasan Obat dan Makanan (57%).

### IV. Pemberdayaan Mitra Kerja dan Masyarakat



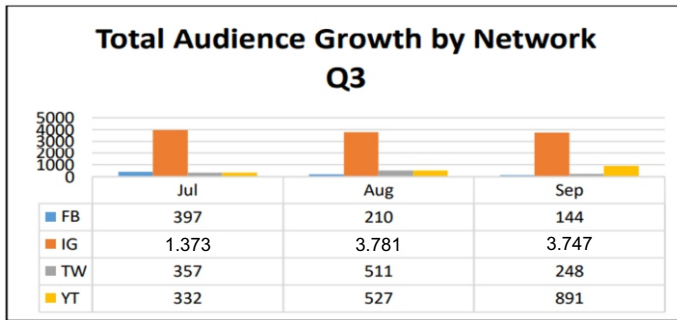
Gambar 12. Grafik Pemberian Pelayanan Informasi Kepada Media Periode Januari - September 2020



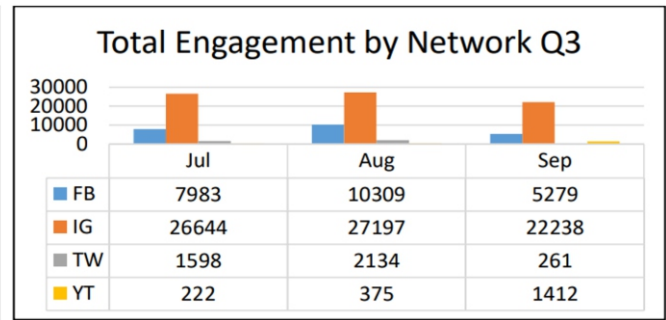
Gambar 13. Persentase Pelaksanaan Wawancara Langsung dan Jawaban Tertulis Kepada Media Periode Januari – September 2020

Hingga bulan September 2020 (triwulan III) Badan POM telah menerbitkan 39 (tiga puluh sembilan) siaran pers dan 13 (tiga belas) penjelasan/klarifikasi isu tentang Obat dan Makanan. Seluruh siaran pers dan penjelasan/klarifikasi berita dipublikasikan melalui website dan media sosial Badan POM.

Badan POM telah melakukan 59 (lima puluh sembilan) kali kegiatan pelayanan informasi kepada media, yaitu 51 (lima puluh satu) kali wawancara Pimpinan Badan POM dengan media dan 8 (delapan) kali talkshow atas permintaan media. Sebagian besar permohonan wawancara dari media atau sebesar 62,75% ditindaklanjuti melalui jawaban tertulis. Pemberian jawaban secara tertulis dilakukan dengan mempertimbangkan faktor keamanan dan efektivitas waktu penyampaian jawaban kepada media, terutama selama masa pandemi COVID-19.



Gambar 14. Pertumbuhan Audience Media Sosial Badan POM Triwulan III Tahun 2020



Gambar 15. Total Engagement Media Sosial Badan POM Triwulan III Tahun 2020

Badan POM juga secara aktif menyampaikan informasi seputar kegiatan strategis Badan POM melalui Berita Aktual yang diunggah melalui website resmi Badan POM dan disebarkan kepada media massa. Tercatat 130 (seratus tiga puluh) Berita Aktual telah dipublikasikan, yang merupakan hasil peliputan kegiatan Badan POM dari awal tahun hingga September 2020. Adapun peliputan kegiatan Badan POM yang telah dilakukan adalah sebanyak 214 (dua ratus empat belas) kegiatan, baik di dalam kantor, di dalam kota maupun di luar kota.

Terkait publikasi kinerja Badan POM melalui media sosial selama periode Januari September 2020, sebanyak 1.211 *post*. Platform *Twitter* adalah platform yang memiliki aktivitas tertinggi sebanyak 855 *tweets*, diikuti *Facebook* sebanyak 169 *post*, *Instagram* 150 *post*, serta *Youtube* 37 video.

Pertumbuhan *audience* pada triwulan III terhadap 4 platform media sosial mengalami kenaikan yang cenderung stabil. *Instagram* merupakan platform dengan total *audience* tertinggi dengan jumlah *audience* sebanyak 11.497, diikuti platform *Youtube* dengan jumlah 1.750 *audience*, *Twitter* dengan jumlah *audience* sebanyak 1.116 platform, dan *Facebook* dengan 751 *audience*.



Gambar 16. Top engagement content pada platform Facebook Triwulan III Tahun 2020

Top engagement content pada platform Facebook pada triwulan III ini terdapat pada konten Presiden RI meninjau pelaksanaan Uji Klinik di Rumah Sakit Pendidikan UNPAD/RS Hasan Sadikin Bandung, sebagai sentra pelaksanaan uji klinik. Konten ini mendapatkan 2.793 *engaged user*.



Gambar 17. Top engagement content pada Instagram Triwulan III Tahun 2020

Top engagement content pada platform Facebook pada triwulan III ini terdapat pada konten Presiden RI meninjau pelaksanaan Uji Klinik di Rumah Sakit Pendidikan UNPAD/RS Hasan Sadikin Bandung, sebagai sentra pelaksanaan uji klinik. Konten ini mendapatkan 2.793 *engaged user*.

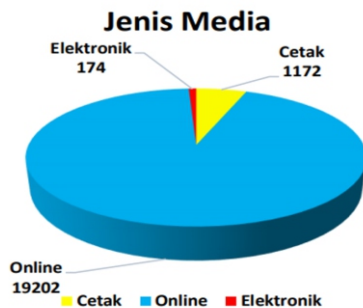
Pada platform *Twitter*, *top engagement content* terdapat pada tweet “Perjalanan Mencari dan Menemukan Obat Merupakan Perjalanan yang Panjang” yang mampu meraih 1.771 *engagements*. Untuk platform *Youtube*, konten yang paling banyak dilihat adalah konten Anugerah ASN Inspiratif 2020, dengan engagement sebesar 1.199, dan telah ditonton sebanyak 2.177 views. Terkait monitoring pemberitaan Badan POM, hingga bulan September 2020 (triwulan III) terdapat 20.548 pemberitaan. Pemberitaan tersebut terdiri dari pemberitaan secara umum terkait Obat dan makanan dan juga terkait Badan POM secara khusus. Dari 20.548 pemberitaan tersebut, distribusi sentimen berita mengenai Badan POM didominasi oleh pemberitaan bertonasi netral, yaitu sebanyak 13.901 berita (67,65%), diikuti dengan pemberitaan bertonasi positif sebanyak 6.606 berita (32,15%) dan 41 berita (0,20%) bertonasi negatif.

Dilihat dari tonasi pemberitaan terkait Badan POM, didominasi oleh tonasi netral dan positif, meskipun masih tetap ada pemberitaan bertonasi negatif disetiap bulannya. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Badan POM sudah dipandang cukup baik, terutama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pemberitaan terkait dukungan Badan POM dalam penanganan COVID-19 memberikan andil yang besar dalam tonasi pemberitaan. Terutama terkait pendampingan uji klinik fase 3 Vaksin COVID-19 dan berbagai dukungan lain dalam penanganan COVID-19 di Indonesia.

Pemberitaan terkait Badan POM dari awal tahun cenderung menunjukkan tren kenaikan setiap bulannya. Puncaknya terjadi bulan Agustus dengan total pemberitaan sejumlah 4.584. Salah satu yang menjadikan bulan Agustus sebagai *peak* tertinggi pemberitaan hingga adalah banyaknya kegiatan Badan POM yang berhubungan dengan obat maupun vaksin COVID-19. Pada bulan tersebut uji klinik fase 3 vaksin COVID-19 Sinovac mulai dilakukan dan juga obat kombinasi COVID-19 Unair-TNI AD-BIN gencar dibicarakan telah selesai uji klinik fase 3 dengan hasil yang memuaskan. Tren kenaikan berhenti di bulan Agustus dan turun di bulan September, meskipun dibandingkan dengan bulan Juli jumlah pemberitaan di bulan September masih tetap lebih besar.

Bulan	Positif	Netral	Negatif	Total
Januari	341	832	2	1.175
Februari	557	662	9	1.228
Maret	399	1.202	3	1.604
April	747	1.032	2	1.781
Mei	890	1.217	8	2.115
Juni	1.047	1.649	3	2.699
Juli	452	2.434	1	2.887
Agustus	1.239	3.344	1	4.584
September	934	1.958	12	2.904

Gambar 18. Jumlah Pemberitaan tentang Badan POM Periode Januari - September 2020



Gambar 19. Diagram Sebaran Pemberitaan Badan POM di Media Periode Januari - September 2020

Berdasarkan jenis medianya, pemberitaan terkait Badan POM didominasi oleh pemberitaan melalui media online, yaitu sebanyak 19.202 berita (93,45%), selanjutnya diikuti 1.172 berita (5,70%) melalui media cetak dan 174 berita (0,85%) melalui media elektronik.

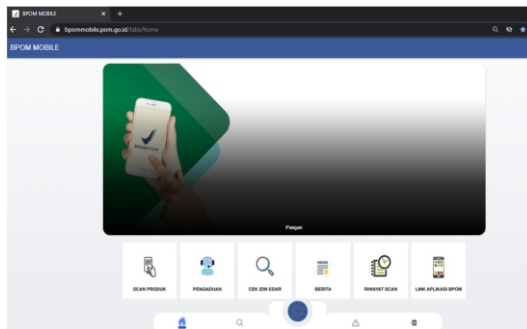
# Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan Triwulan III Tahun 2020



## V. Digitalisasi Pelayanan Publik

### a. Hasil Pengembangan Aplikasi BPOM Mobile

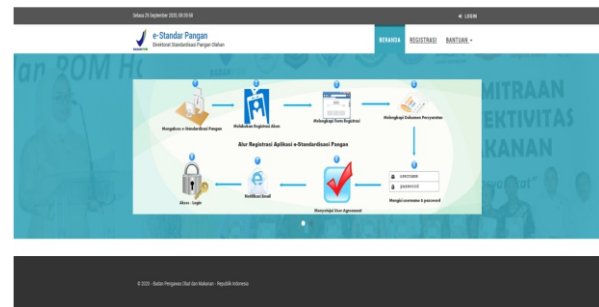
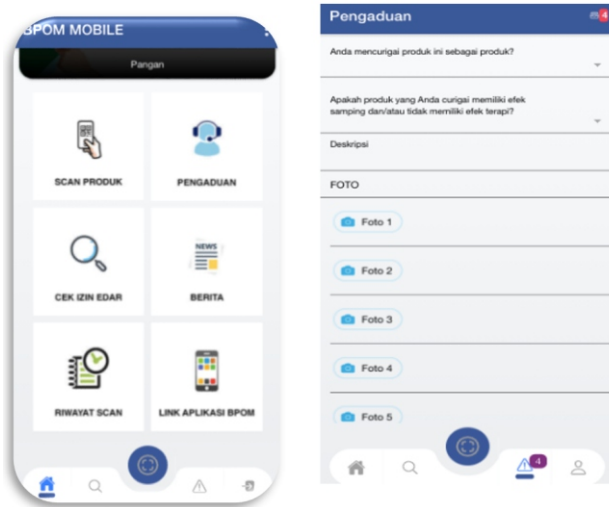
Guna mengikuti perkembangan teknologi dan informasi serta meningkatkan optimalitas aplikasi *mobile* maka tahun 2020, BPOM *mobile* dikembangkan berupa *Progressive Web Application (PWA)*. Kelebihan PWA antara lain aplikasi menjadi lebih responsif; mempersingkat *loading time*; menghasilkan aplikasi yang hemat data dan *low-storage*; dan percepatan dalam *update* sistem. Hasil pengembangan BPOM *mobile* tahun 2020 yaitu:



BPOM mobile dapat diakses melalui desktop atau PC melalui domain <https://bpommobile.pom.go.id>



BPOM Mobile pada Playstore



Terdapat fitur pelaporan obat Substandard dan Ilegal termasuk Palsu khusus *user* tenaga kesehatan sebagai tindak lanjut dari program WHO. Sosialisasi awal kepada tenaga kesehatan sudah dilaksanakan pada 29 September 2020.

## b. Pengembangan Aplikasi e-Standar Pangan

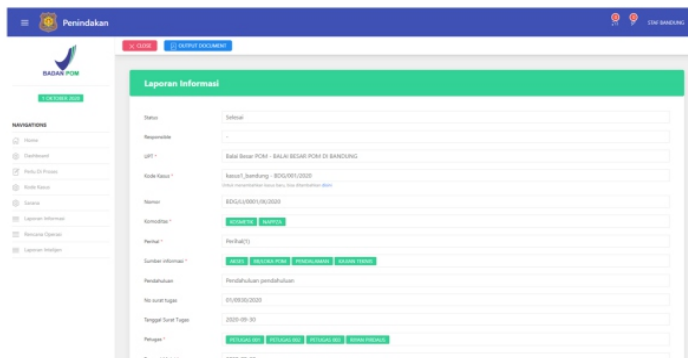
Aplikasi e-Standar Pangan ditujukan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelaku usaha dalam pengajuan proses standarisasi pangan dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan atau perorangan ke Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan lebih mudah, lebih cepat, lebih efisien dan juga transparan.

Melalui aplikasi e-Standar Pangan setiap pelaku usaha dapat melakukan proses registrasi produk standar pangan dan serta mengupload dokumen *hardcopy* perusahaan ke Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk dilakukan proses verifikasi.

## c. Pengembangan Aplikasi Peta Penindakan

Aplikasi ini merupakan kumpulan hasil dari kegiatan pengamanan obat dan makanan yang dilakukan oleh kedeputian 4. Selain sebagai *database* kegiatan deputi 4 aplikasi berfungsi memberkan informasi terkait pengamanan obat dan makanan.

Pada tahun 2020 ini dilakukan pengembangan kembali pada penyempurnaan modul Peta Rawan kasus dan modul Pelaporan Intelijen. Pada modul Peta Rawan Kasus berfokus pada mempermudah mengambil informasi dari data yang dikumpulkan oleh Dit. Pengamanan dan Balai. Pada modul Pelaporan Intelijen difokuskan pada mengakomodir pelaporan intelijen di pusat, balai dan loka. Saat ini pengembangan penyempurnaan modul Peta Rawan Kasus sudah melakukan UAT pada tanggal 30 Juli 2020, sedangkan modul Pelaporan Intelijen sudah melakukan UAT pada tanggal 30 September 2020. Pada saat ini modul Rawan Kasus sudah digunakan oleh dit. pengamanan, balai, dan loka, sedangkan masih menunggu bimbingan teknis dari dit. Intelijen ke balai dan loka.



Laporan informasi salah satu pengembangan Modul Pelaporan Intelijen



Heatmap salah satu pengembangan Modul Peta Rawan Kasus

## VI. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Sampai dengan triwulan III tahun 2020, telah ditetapkan 27 (Dua Puluh Tujuh) Peraturan Badan POM, 82 (Delapan Puluh Dua) Keputusan Kepala Badan POM, 76 (Tujuh Puluh Enam) Rumusan Perjanjian. Selain itu Badan POM telah melakukan pembahasan 1 (satu) Rancangan Undang-Undang dan 2 (Dua) Rancangan Peraturan Pemerintah. Bersama dengan Kementerian Kesehatan, Badan POM turut serta dalam pembahasan RPP tentang Revisi PP 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.



### 1 Judul RUU

Rancangan Undang-Undang:  
Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan.



### 2 Judul RPP

Rancangan Peraturan Pemerintah:  
1. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.  
2. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan.

### 27 Judul Peraturan Badan POM



1. Peraturan Badan POM Nomor 1 tahun 2020 Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor Hk.00.05.4.1745 Tahun 2003 Tentang Kosmetik.
2. Peraturan Badan POM Nomor 2 tahun 2020 Tentang Pengawasan Produksi Dan Peredaran Kosmetika.
3. Peraturan Badan POM Nomor 3 tahun 2020 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Subbidang Pengawasan Obat Dan Makanan Terpadu.
4. Peraturan Badan POM Nomor 4 tahun 2020 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Dilingkungan BPOM.
5. Peraturan Badan POM Nomor 5 tahun 2020 Tentang Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik Sektor Obat Dan Makanan.
6. Peraturan Badan POM Nomor 6 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat Yang Baik.
7. Peraturan Badan POM Nomor 7 tahun 2020 Tentang Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Urusan Pemerintah Bidang Pengawasan Farmasi Dan Makanan.
8. Peraturan Badan POM Nomor 8 tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan Secara Daring.

## 27 Judul Peraturan

### Badan POM



9. Peraturan Badan POM Nomor 9 tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan POM Tahun 2020-2024.
10. Peraturan Badan POM Nomor 10 tahun 2020 Tentang Manajemen Kinerja ASN dilingkungan Badan POM.
11. Peraturan Badan POM Nomor 11 tahun 2020 Tentang Registrasi Suplemen Kesehatan.
12. Peraturan Badan POM Nomor 12 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika.
13. Peraturan Badan POM Nomor 13 tahun 2020 Tentang Bahan Tambahan Pangan Perisa.
14. Peraturan Badan POM Nomor 14 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pom No 29 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat Dan Makanan Kedalam Wilayah Indonesia.
15. Peraturan Badan POM Nomor 15 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pom No 30 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan Kedalam Wilayah Indonesia.
16. Peraturan Badan POM Nomor 16 tahun 2020 Tentang Pedoman Pencantuman Informasi Nilai Gizi Untuk Pangan Olahan Yang Di Produksi Oleh Usaha Mikro Dan Usaha Kecil.
17. Peraturan Badan POM Nomor 17 tahun 2020 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi Dan Makanan.
18. Peraturan Badan POM Nomor 18 tahun 2020 Tentang Pedoman Penilaian Obat Berbasis Sel Manusia.
19. Peraturan Badan POM Nomor 19 tahun 2020 Tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Obat Dan Bahan Obat.
20. Peraturan Badan POM Nomor 20 tahun 2020 Tentang Perubahan atas perbpom no 28 tahun 2019 tentang bahan penolong dalam pengolahan pangan.
21. Peraturan Badan Pom Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan.
22. Peraturan Badan Pom Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dilingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan.
23. Peraturan Badan Pom Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dilingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat Dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat Dan Makanan.
24. Peraturan Badan Pom Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Badan Pom Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pangan Olahan Untuk Keperluan Gizi Khusus.
25. Peraturan Badan Pom Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Pedoman Cara Produksi Yang Baik Untuk Pangan Steril Komersial Yang Disterilisasi Setelah Dikemas.
26. Peraturan Badan Pom Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Permohonan Analisa Hasil Pengawasan Dalam Rangka Impor Dan Eksor Narkotika , Psikotropika Dan Prekursor Farmasi.
27. Peraturan Badan Pom Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Kriteria Dan Tata Laksana Registrasi Obat.

## VII. Penguatan dan Penataan Organisasi dan Tata Laksana serta Pelaksanaan Reformasi birokrasi

### Penataan Organisasi Dalam Rangka Penyederhanaan Birokrasi

Penyederhanaan birokrasi merupakan salah satu prioritas kerja Presiden RI periode tahun 2019-2024. Penyederhanaan birokrasi dilakukan dengan menyederhanakan struktur birokrasi menjadi 2 (dua) level dan mengganti/mengalihkan jabatan administrasi dengan jabatan fungsional yang berbasis pada keahlian/keterampilan dan kompetensi tertentu.

Penyederhanaan birokrasi BPOM meliputi penyetaraan jabatan administrasi dan penyederhanaan struktur organisasi. Sebagai tindak lanjut penyederhanaan birokrasi sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, BPOM telah melakukan pemetaan jabatan administrasi Eselon III (administrator) dan eselon IV (pengawas) yang dialihkan ke jabatan fungsional dan jabatan yang tidak dialihkan ke jabatan fungsional.

BPOM telah melakukan pembahasan penyederhanaan struktur organisasi dengan internal BPOM dan dilanjutkan pembahasan dengan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB. BPOM telah mendapatkan persetujuan tertulis terkait penataan organisasi dan tata kerja BPOM dan penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dalam rangka penyederhanaan birokrasi melalui Surat Menteri PANRB Nomor B.892/M.KT.01/2020 tanggal 16 Juli 2020 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja BPOM dan Surat Persetujuan Menteri PANRB Nomor B/529/M.SM.02.00/2020 tanggal 28 Agustus 2020 hal Persetujuan Penyetaraan JA ke Dalam JF di Lingkungan BPOM.

Berdasarkan hasil penyederhanaan birokrasi BPOM, terdapat 83,31% pejabat administrasi yang dilakukan penyetaraan dan pengalihan ke dalam jabatan fungsional terdiri atas 80,10% jabatan administrator (eselon III) yang dialihkan ke jabatan fungsional dan 84,77% jabatan pengawas (eselon IV) yang dialihkan ke jabatan fungsional. Rekapitulasi penyederhanaan birokrasi BPOM sebagai berikut:

No	Jabatan Struktural	Struktur Organisasi Eksisting	Struktur Organisasi Baru Yang Dipertahankan	Pejabat Administrasi Dialihkan ke Fungsional
1	(Eselon III)	201	40 (19,90%)	161 JF Ahli Madya (80,10%)
2	(Eselon IV)	440	67 (15,23%)	373 JF Ahli Muda (84,77%)
<b>Total</b>			<b>107 (16,69%)</b>	<b>534 (83,31%)</b>



Berkeaan dengan hal tersebut, BPOM telah menyusun 3 (tiga) Peraturan BPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan BPOM dan telah dilakukan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM tanggal 13 Agustus 2020. BPOM telah mendapat persetujuan harmonisasi 3 (tiga) Peraturan BPOM tentang OTK melalui Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Nomor PPE.PP.01.03-1324 tanggal 27 Agustus 2020 hal Penyampaian Hasil Pengharmonisan Rancangan Peraturan BPOM selanjutnya ditetapkan Kepala BPOM dan dilakukan pengundangan 3 (tiga) Peraturan BPOM oleh Kementerian Hukum dan HAM, terdiri atas:

- 1) Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1002);
- 2) Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan BPOM (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1003);
- 3) Peraturan BPOM Nomor 23 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional BPOM (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1004).

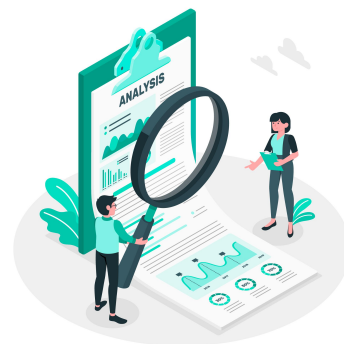
## Penilaian Unit Pelayanan Publik BPOM

### a. Penilaian Lingkup BPOM

Penilaian internal kinerja UPP di lingkungan BPOM bertujuan untuk mendorong UPP di lingkungan BPOM melakukan peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik menuju pelayanan prima, yaitu pelayanan berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur yang diberikan oleh penyelenggara layanan kepada penerima. Hasil penilaian internal kinerja UUP di lingkungan BPOM dapat dijadikan sebagai acuan untuk pemilihan lokus evaluasi unit kerja di lingkungan BPOM untuk penilaian evaluasi kinerja UPP oleh Kementerian PANRB tahun 2020.

Penilaian internal kinerja UPP di lingkungan BPOM dilakukan pada Juli 2020 oleh tim penilai internal pada 47 (empat puluh tujuh) UPP di lingkungan BPOM melalui aplikasi [evortal.pom.go.id](http://evortal.pom.go.id). Tim penilai kinerja UPP BPOM ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.03.20.11 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan BPOM.

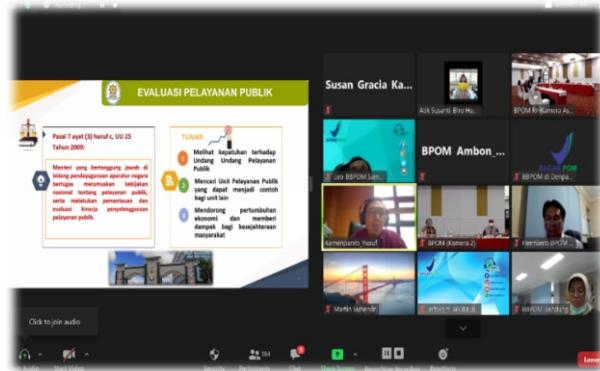
Berdasarkan penilaian kinerja tahun 2020 diperoleh rata-rata indeks pelayanan publik UPP di lingkungan BPOM sebesar 4,04 (kategori A- atau "Sangat Baik"). Pada penilaian internal UPP tahun 2020 diperoleh hasil bahwa Direktorat Registrasi Pangan Olahan dan Balai Besar POM di Denpasar sebagai UPP dengan kategori A atau "Pelayanan Prima". Berdasarkan hasil penilaian internal kinerja UPP tahun 2020, BBPOM di Denpasar ditunjuk sebagai lokus evaluasi penilaian UPP BPOM tahun 2020 oleh Kementerian PANRB.



## b. Penilaian UPP BPOM oleh Kementerian PANRB

BPOM mengusulkan BBPOM di Denpasar sebagai lokus evaluasi melalui surat Plt. Sekretaris Utama BPOM Nomor B-OT.01.03.2.22.08.20.424 tanggal 3 Agustus 2020 hal Usulan Lokus Evaluasi UPP BPOM Tahun 2020. BBPOM di Denpasar telah melakukan pengisian Formulir F01 dan F03 pada aplikasi <https://sipp.menpan.go.id/webcontrol/login>, dan telah dievaluasi secara online oleh tim evaluator Kementerian PANRB pada tanggal 21 September 2020. Penilaian UPP BBPOM di Denpasar dilakukan secara daring dan didampingi oleh Tim UPP BPOM, di antaranya Inspektur II, Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dan Kepala Biro Hukum dan Organisasi serta perwakilan Direktorat Registrasi Pangan Olahan dan Biro Umum dan Sumber Daya Manusia.

Evaluasi UPP BBPOM di Denpasar mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dengan 6 (enam) aspek penilaian, terdiri atas Kebijakan Pelayanan, Profesionalitas SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan, dan Inovasi.



Entry Meeting dan Sosialisasi Permen PANRB Nomor 17 Tahun 2017 oleh Asdep Koordinasi Pelaksanaan, Kebijakan, dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah II Kemen PANRB kepada Tim Penilai Kinerja UPP BPOM tanggal 17 Juli 2020

## Pelaksanaan Audit Surveillance dan Sertifikasi QMS ISO 9001:2015 BPOM

### a. Entry Meeting Pelaksanaan Audit Surveillance dan Sertifikasi QMS ISO 9001:2015 BPOM

Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu (QMS) BPOM dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.03.20.96 Tahun 2020 tentang Penerapan Sistem Manajemen Mutu (QMS) ISO 9001:2015 BPOM.

Penerapan QMS BPOM berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 lebih difokuskan kepada aspek kepemimpinan dan perencanaan berbasis risiko.

- 1) Aspek kepemimpinan, komitmen dan peran Pimpinan BPOM, Kepala Unit Kerja Pusat, dan Kepala Balai Besar/Balai POM sangat menentukan penerapan QMS BPOM secara konsisten di unit organisasinya masing-masing.
- 2) Aspek perencanaan berbasis risiko, implementasinya diintegrasikan dengan pengendalian risiko berdasarkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Sesuai dengan surat Plt. Sekretaris Utama Nomor B-OT.02.02.2.22.08.20.176 tentang *Entry Meeting* Audit Surveilans dan Sertifikasi QMS ISO 9001:2015 BPOM pada tanggal 6 Agustus 2020, telah diadakan *entry meeting* pelaksanaan Audit Surveilans dan Sertifikasi QMS ISO 9001:2015 yang dipimpin oleh Plt. Sekretaris Utama selaku Deputy Manajemen Puncak dan dihadiri oleh 83 (delapan puluh tiga) yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) Unit Kerja Pusat, 33 (tiga puluh tiga) Balai Besar/Balai POM dan 21 (dua puluh satu) Loka POM dan perwakilan *Lead Auditor* dari PT. TUV Rheinland sebagai pemenang pengadaan jasa konsultasi kegiatan Surveilans dan Sertifikasi ISO 9001:2015 BPOM secara daring.

#### **b. Pendampingan Persiapan Dokumen Mutu Sertifikasi QMS ISO 9001:2015 untuk 19 (sembilan belas) Loka POM Kabupaten/Kota**

Dalam rangka mempersiapkan dokumen mutu untuk 19 (sembilan belas) Loka POM Kabupaten Kota yang disertifikasi tahun 2020, dilakukan pendampingan secara daring untuk Loka POM sebanyak 5 bets kegiatan yaitu:

- 1) Tanggal 7 Agustus 2020 untuk Loka POM Kabupaten Bogor dan Loka POM di Kabupaten Banyumas.
- 2) Tanggal 10 Agustus 2020 untuk Loka POM di Kota Surakarta, Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah, Loka POM di Kabupaten Buleleng, dan Loka POM di Kota Palopo.
- 3) Tanggal 14 Agustus 2020 untuk Loka POM di Kabupaten Banggai, Loka POM di Kabupaten Tulangbawang, Loka POM di Kota Payakumbuh, dan Loka POM di Kabupaten Tangerang.
- 4) Tanggal 28 Agustus 2020 untuk Loka POM di Kabupaten Tasikmalaya, Loka POM di Kota Balikpapan, Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat, Loka POM di Kota Tarakan, dan Loka POM di Kabupaten Kediri.
- 5) Tanggal 25 Agustus 2020 untuk Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, Loka POM di Kabupaten Jember, dan Loka POM di Kabupaten Lubuklinggau.
- 6) Tindaklanjut dari hasil pendampingan adalah Loka POM Kabupaten/Kota melakukan penyempurnaan dokumen sehingga diharapkan pada pelaksanaan audit seluruh dokumen sudah lengkap.

#### **c. Audit Sertifikasi Stage 1 untuk 19 (sembilan belas) Loka POM Kabupaten/Kota**

Menindaklanjuti kegiatan *entry meeting* pelaksanaan audit surveilans dan sertifikasi QMS ISO 9001:2015 pada tanggal 6 Agustus 2020, berdasarkan surat Plt. Sekretaris Utama Nomor B-OT.02.2.22.08.20.431 tanggal 6 Agustus 2020 perihal Pelaksanaan Audit Surveilans dan Sertifikasi QMS ISO 9001:2015 kegiatan audit surveilans dan sertifikasi mulai dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2020 dengan melakukan audit *stage 1* untuk 19 (sembilan belas) Loka POM Kabupaten/Kota. Loka POM yang diaudit tersebut adalah Loka POM di Kabupaten Bogor, Loka POM di Kabupaten Banyumas, Loka POM di Kota Surakarta, Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah, Loka POM di Kabupaten Buleleng, Loka POM di Kota Palopo, Loka POM di Kabupaten Banggai, Loka POM di Kabupaten Tulangbawang, Loka POM di Kota Payakumbuh, Loka POM di Kabupaten Tangerang, Loka POM di Kabupaten Tasikmalaya, Loka POM di Kota Balikpapan, Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat, Loka POM di Kota Tarakan, Loka POM di Kabupaten Kediri, Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, Loka POM di Kabupaten Jember, dan Loka POM di Kabupaten Lubuklinggau.

Kegiatan audit sertifikasi *stage 1* selesai dilaksanakan tanggal 28 Agustus 2020 dengan hasil 19 (sembilan belas) Loka POM dapat mengikuti audit surveilans *stage 2*.

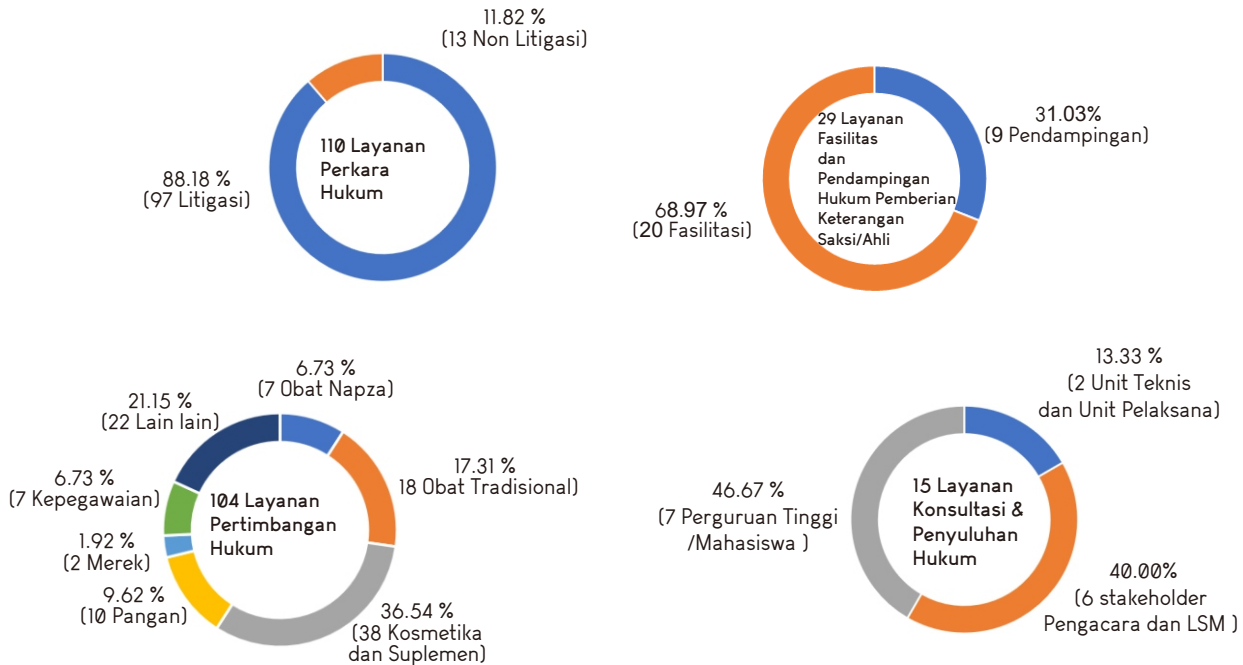
## VIII. Layanan Advokasi Hukum (Pelayanan Hukum)

Peran unit kerja yang membidangi hukum/legal pada setiap Instansi Pemerintah terkait pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas di lingkungan pemerintahan adalah sebagai unit kerja yang mendukung dalam aspek hukum, agar pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas-tugas dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak menimbulkan implikasi hukum yang berisiko bagi organisasi.

Dukungan aspek hukum dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas-tugas Badan POM diberikan oleh Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum dan Organisasi berupa Layanan Advokasi Hukum yang terdiri dari pelaksanaan pertimbangan hukum, pelaksanaan penanganan perkara hukum, pelaksanaan pendampingan kepada saksi/ahli serta pelaksanaan konsultasi dan penyuluhan hukum.

### Sampai dengan Triwulan III Tahun 2020

Jumlah layanan advokasi hukum yang diberikan sejumlah 258 layanan yang terdiri dari :



## IX. Kerjasama Dalam dan Luar Negeri

Kerjasama yang dilakukan BPOM sampai dengan Triwulan III 2020, adalah:

1. Memfasilitasi Video Conference (VC) dengan Tim Representatif WHO di Jakarta untuk membahas peninjauan dukungan WHO kepada Badan POM, meningkatkan kolaborasi WHO-Badan POM serta menekankan pentingnya pelibatan peran Badan POM dalam upaya mempercepat penanganan COVID-19.
2. Memfasilitasi kerja sama dengan *Therapeutic Goods Administration* (TGA) Australia dalam penanganan COVID-19, antara lain telah dilakukan pelatihan Laboratorium melalui webinar dalam 2 (dua) tahap. Pelatihan dibuka oleh Ibu Kepala Badan POM dan pimpinan tertinggi TGA (Adj. Prof. John Skeritt).
3. Pertemuan World Health Assembly (WHA) ke-73 yang dihadiri oleh Ibu Kepala Badan POM, yang membahas mengenai isu COVID-19 dan menekankan pentingnya langkah terpadu, sinergis dan komprehensif secara global dalam penanganan COVID-19.
4. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Vaksin Global secara virtual, antara lain membahas peluang dan tantangan dalam penyebaran virus COVID-19 perlu dilakukan upaya secara internasional bekerja sama untuk mempercepat akses terhadap vaksin COVID-19.
5. Pertemuan dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Hukum dan HAM dan untuk membahas akses produk farmasi dan alat Kesehatan dalam kerangka COVID-19, termasuk pembahasan akses Remdesivir Gilead.
6. Pertemuan peninjauan kerja sama Vaksin COVID-19 PT. Bio Farma dengan CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations).
7. Pertemuan virtual antara Sinovac Biotech Ltd. dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian BUMN dan Bio Farma dalam rangka mencapai kesepakatan kerja sama pengembangan dan penelitian vaksin COVID-19 antara Sinovac dan PT. Bio Farma, termasuk rencana uji klinik fase 3 di Indonesia.
8. Pembahasan virtual dengan KBRI Tokyo-Jepang dan Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Pekerja dan Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA) Jepang terkait pemasukan Obat Avigan (Favipiravir) ke Indonesia.
9. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Dit. Asia Selatan dan Tengah dan KBRI New Delhi) dan Industri Farmasi dalam memfasilitasi pemasukan Bahan Baku Obat (BBO), termasuk BBO untuk penanganan COVID-19 dari India yang terkendala akibat adanya kebijakan pelarangan ekspor dan situasi lockdown di India.
10. Biro Kerja Sama telah menerbitkan surat himbauan bantuan/donasi untuk masyarakat (Community Service) di bawah kerangka kerja sama Corporate Social Responsibility (CSR) dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Pengelolaan dan penyaluran bantuan CSR tersebut dikoordinasikan oleh Biro Umum dan SDM.
11. Memfasilitasi beberapa Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara:
  - a. Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PPPOMN, Badan POM tentang Pemeriksaan Laboratorium atas Spesimen COVID-19;
  - b. Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan Universitas Bengkulu dan Balai POM di Bengkulu tentang Kerja Sama Pemanfaatan Laboratorium BSL-2 (Biosafety Level-2) dalam Rangka Percepatan Deteksi COVID-19 di Provinsi Bengkulu.

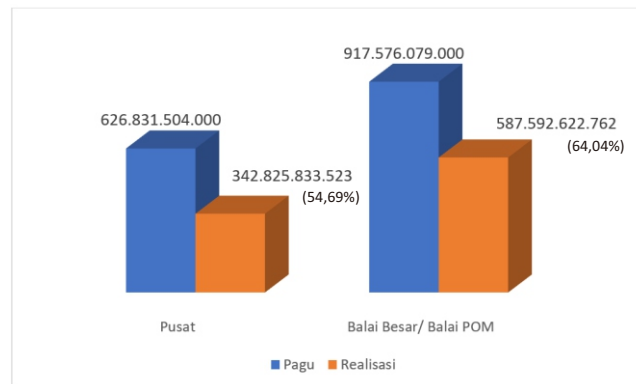
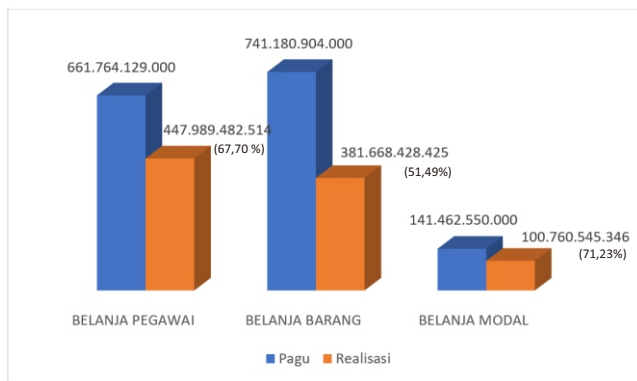
12. Memfasilitasi beberapa Kesepakatan Bersama antara:
  - a. Badan POM dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo tentang Pemeriksaan Uji COVID-19 di Provinsi Gorontalo;
  - b. Badan POM dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Pemeriksaan Uji COVID-19 di Provinsi Sulawesi Tenggara.
13. Memfasilitasi Nota Kesepahaman antara Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional RI dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Kementerian Kesehatan RI dan Badan POM dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Universitas Gadjah Mada dan PT. Saka Farma Laboratories dan Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia dan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia tentang Penelitian dan Pengembangan Kandidat Immunomodulator dari Produk Herbal dalam Penanganan COVID-19.
14. Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Badan POM dan Saudi Food and Drug Authority (SFDA) tentang Pengawasan, Kualitas dan Keamanan Pangan dan Produk Obat tersebut memiliki arti penting dan historis yang menandai secara resmi dimulainya kerja sama di bidang Obat dan Makanan diantara Otoritas Regulator Obat dan Makanan Indonesia dan Arab Saudi.
15. Kunjungan kerja Badan POM ke UEA pada tanggal 24-26 Agustus 2020 merupakan bagian dari rangkaian upaya Pemerintah Indonesia guna memenuhi kebutuhan vaksin untuk penanganan COVID-19. Kunjungan kerja ini untuk menindaklanjuti hasil-hasil kunjungan pada tingkat Menteri Luar Negeri dan Menteri BUMN terkait dukungan kerja sama diantara Kimia Farma (KF) dan G-42 /Sinopharm dalam pengembangan vaksin COVID-19.

Pada kunjungan ini, BPOM telah berdialog dengan beberapa institusi dan perusahaan farmasi/vaksin, mengunjungi dan melihat langsung pelaksanaan uji klinik tahap 3 dengan hasil-hasil sebagai berikut:

  - a. Pertemuan dengan Group 42 (G-42) dan Sinopharm : kedua belah pihak sepakat untuk mendukung pelaksanaan uji klinik COVID-19 di Indonesia yang akan dilaksanakan oleh Kimia Farma dan G-42.
  - b. Pertemuan dengan Abu Dhabi Department of Health (ADDOH) : ADDOH menyampaikan beberapa aspek teknis dalam mendukung kesuksesan pelaksanaan uji klinik dengan melibatkan interaksi lintas sektor antara lain WHO SEARO (South East Asia Regional Office), industri farmasi dan vaksin, dan scientist dalam menyusun critical review dari hasil uji klinik fase 1 dan 2 COVID-19.
  - c. Kunjungan ke *Vaccine Testing Centre* (Pusat Uji Klinik Vaksin COVID-19) : Badan POM melihat langsung pelaksanaan uji klinis fase 3 kandidat vaksin COVID-19 yang diselenggarakan di Abu Dhabi National Exhibition Centre (ADNEC). Hal ini dapat dimanfaatkan oleh Badan POM dalam mendampingi pelaksanaan uji klinik kandidat vaksin COVID-19 di Indonesia.
  - d. Pertemuan dengan Kementerian Kesehatan dan Pencegahan UEA : untuk memastikan akses yang cepat atas vaksin COVID-19 melalui proses regulatori yang terarah dan sejalan dengan standar internasional guna penjaminan keamanan mutu efektifitas /manfaat dari vaksin tersebut yang tengah dikembangkan oleh industri farmasi/vaksin kedua negara.
16. Focus Group Discussion (FGD) Kolaborasi Obat dan Vaksin dalam Perspektif Kerja Sama Negara-negara OKI pada tanggal 3 September 2020 yang menghadirkan Sekretariat OKI dan WHO Representative to Indonesia (pre-recording messages) dan narasumber dari sejumlah pemangku kepentingan (Stakeholders) nasional baik dari K/L terkait (Kemlu, Kemenkes, Kemenristek/BRIN, Kementerian BUMN), akademisi (FKUI), institusi riset (Lembaga Eijkman) dan Industri Farmasi (Bio Farma).

## IX. Pengelolaan Anggaran

Setelah dilakukan refocusing anggaran tahun 2020, BPOM mendapat anggaran sebesar Rp1.544.407.583.000,- untuk seluruh kegiatan di pusat maupun daerah. Anggaran tersebut terdiri dari: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. Anggaran tersebut tersebar untuk 10 Satker Pusat dan 33 Balai Besar/Balai POM. Realisasi anggaran Triwulan III tahun 2020 sebesar Rp930.418.456.285,- (60,24%) yang terdiri dari realisasi anggaran untuk 10 Satker Pusat Rp342.825.833.523,- dan realisasi anggaran untuk seluruh Balai Besar/Balai POM Rp587.592.622.762,-



## X. Pemantauan Capaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) BPOM

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, BPOM secara rutin telah melakukan pemantauan pelaksanaan RKP BPOM Tahun 2020. Pemantauan dilakukan terhadap perkembangan realisasi anggaran serta realisasi pencapaian sasaran kegiatan dan pencapaian sasaran program dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, juga kendala yang dihadapi untuk dapat segera diidentifikasi upaya tindak lanjut yang dibutuhkan. Pemantauan capaian RKP dilakukan per triwulan. Hasil pemantauan capaian RKP sampai dengan Triwulan III tahun 2020 sebagaimana terlampir pada buku ini.

## PENUTUP

Kinerja yang ditampilkan dalam laporan ini hanya sebagian dari kinerja keseluruhan BPOM. Namun demikian para pihak terkait diharapkan mendapat gambaran jelas bahwa program dan kegiatan BPOM berorientasi pada pencapaian tujuan utama pembangunan pengawasan obat dan makanan 2020-2024 yaitu meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut BPOM akan terus berupaya untuk meningkatkan kinerjanya pada masa mendatang, dengan mengutamakan niat baik, komitmen, keterbukaan, perencanaan yang komprehensif (termasuk anggaran), pelaksanaan aksi, evaluasi dan analisis hasil, serta *continuous improvement*.

# LAMPIRAN I

CAPAIAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN 2020

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
1	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Pengawasan Obat	82	indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Pengawasan Obat Tradisional	74	indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Pengawasan Suplemen Kesehatan	81	indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Pengawasan Kosmetik	74	indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Pengawasan Makanan	77	indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	64	%	54,39	84,98
1.1		Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Persentase Obat yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	81	%	87,71
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM		78	%	82,51	105,79
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM		85	%	84,54	99,46
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM		72	%	73,02	101,41
	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT		72	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM		83	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM		71	Nilai	akhir tahun	akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	87	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	87	%	81,05	93,16
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di masing-masing wilayah kerja UPT	55	%	43,12	78,40
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	85	%	96,23	113,21
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	52	%	49,12	94,47
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	60	%	64,29	107,14
		Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	4	nilai indeks	4,00	113,96
		Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	71	nilai	91,95	129,51
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	660	Sekolah	Progres	49,25
		Jumlah desa pangan aman di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	211	desa	Progres	57,65

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	84	pasar	Progres	65,59
		Persentase sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82	%	65,83	80,28
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	75	%	64,52	86,03
		Persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan	65	%	64,62	99,42
		Indeks RB UPT	81	nilai indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai AKIP UPT	81	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN UPT	75	nilai indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	76	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase laboratorium pengawasan obat dan makanan yang sesuai Good Laboratory Practise	70	%	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2	nilai indeks	0,75	49,34
		Nilai Kinerja Anggaran UPT	93	Nilai	51,85	55,75
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	Efisien (92%)	%	89,04	96,78
1.2	Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan	Persentase kajian kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	60	%	76,92	128,21
		Persentase kegiatan pengamanan penindakan yang efektif	80	%	100,00	125,00
		Persentase kajian strategis kejahatan Obat dan Makanan yang diselesaikan sesuai perencanaan	33	%	Progres	50,00
		Persentase data kerawanan kejahatan yang terverifikasi	83	%	87,86	105,86

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase kajian taktis kejahatan Obat dan Makanan yang terselesaikan tepat waktu	50	%	84,62	169,23
		Persentase kegiatan pengamanan dalam rangka penindakan yang terlaksana sesuai perencanaan	60	%	40,00	66,67
		Indeks RB Direktorat Pengamanan	85	nilai indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengamanan	75	nilai indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Direktorat Pengamanan yang optimal	2	nilai indeks	0,00	0,00
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengamanan	Efisien (88%)	%	75,00	85,23
1.3	Intelijen Obat dan Makanan	Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas	75	%	92,86	123,81
		Persentase laporan informasi yang sesuai standar	75	%	66,14	88,19
		Persentase laporan intelijen yang sesuai standar	75	%	85,71	114,29
		Persentase hasil patroli siber yang efektif	55	%	63,72	115,85
		Jumlah profil jaringan kejahatan Obat dan Makanan yang terpetakan	2	jaringan	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks RB Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	85	nilai indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks profesionalisme ASN Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	75	nilai indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang optimal	2	nilai indeks	0,00	0,00
		Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Intelijen	Efisien (88%)	%	75,00	85,23
1.4	Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan	Persentase sarana Produksi Obat Tradisional yang memenuhi persyaratan CPOTB	77	%	65,28	84,78

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase UMKM Obat Tradisional yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap	83	%	37,78	45,35
		Persentase iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	62	%	42,31	68,24
		Persentase pemenuhan pedoman pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan oleh Balai/ Balai Besar POM	80	%	91,78	114,73
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	86	nilai indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase keputusan hasil pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	73	%	73,99	101,36
		Persentase hasil pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang ditindaklanjuti	72	%	59,91	83,21
		Persentase laporan keamanan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang ditindaklanjuti tepat waktu	92	%	100,00	108,70
		Jumlah UMKM Obat Tradisional yang difasilitasi dalam pemenuhan CPOTB	90	Jumlah	73	81,11
		Persentase UPT yang dilakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	60	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase permohonan penilaian sarana dan produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	88	%	94,90	107,84
		Indeks Pelayanan Publik dibidang pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	3	nilai indeks	akhir tahun	akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	88	nilai indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Tingkat Efektifitas KIE di bidang OT dan SK	89	Nilai	86,22	97,08
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	75	nilai indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Unit Kerja Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang optimal	2	nilai indeks	0,00	0,00
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	Efisien (99%)	%	90,00	90,91
1.5	Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru	Persentase industri pangan olahan yang menerapkan Program Manajemen Risiko	18	%	16,76	93,09
		Persentase toko modern yang menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan	10	%	0,00	0,00
		Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Pengawasan Pangan Olahan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru Oleh UPT BPOM sesuai dengan NSPK	65	%	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru	86	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pelayanan publik di Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru	3	Indeks	3,98	127,97
		Persentase Keputusan penilaian sarana Produksi Pangan Olahan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru yang di selesaikan tepat waktu	80	%	100,00	125,00

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase Keputusan Hasil Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru yang diselesaikan sesuai standar	85	%	83,12	97,79
		Persentase Sarana produksi dan sarana distribusi yang diinspeksi dalam rangka pendalaman mutu hasil pengawasan pangan risiko tinggi dan teknologi baru	85	%	63,81	75,07
		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder	45	%	41,10	91,33
		Persentase insiden/kasus keamanan pangan yang ditindaklanjuti	85	%	87,50	102,94
		Persentase Tingkat Pengetahuan Pelaku Usaha dan Masyarakat Terhadap Pengawasan Pangan Olahan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru yang Diberikan	81	%	88,24	108,93
		Persentase UPT yang memahami sistem Pengawasan Pangan Olahan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru	40	%	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru	85	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru	75	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru yang Optimal	2	Indeks	0,00	0,00
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru yang baik	Efisien (88%)	%	75,00	85,23

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
1.6	Pengawasan Kosmetik	Persentase Sarana Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan	85	%	67,81	79,77
		Persentase UMKM Kosmetik yang Menerima Sertifikat CPKB	85	%	85,71	100,84
		Persentase Iklan Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan	85	%	80,43	94,63
		Persentase pemenuhan ketentuan pengawasan kosmetik oleh Balai Besar/Balai POM/Loka POM	83	%	86,67	104,42
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan kosmetik	84	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetik yang Diselesaikan Tepat Waktu	85	%	80,36	94,54
		Persentase Hasil Pengawasan Kosmetik yang Ditindaklanjuti oleh Pelaku usaha/Stakeholder	81	%	59,22	73,10
		Persentase laporan keamanan Kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu	88	%	84,33	95,83
		Persentase UPT yang di lakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan kosmetik	80	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang di selesaikan tepat waktu	90	%	96,93	107,70
		Indeks Pelayanan Publik dibidang pengawasan kosmetik	4	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Jumlah UMKM kosmetik yang di fasilitasi dalam pemenuhan CPKB	56	UMKM	57	101,79
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Kosmetik	85	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Kosmetik	75	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang optimal	2	Indeks	0,00	0,00		

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Kosmetik	Efisien (100%)	%	78,00	78,00
1.7	Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Persentase keputusan hasil pengawasan di bidang distribusi dan pelayanan obat yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	70	%	74,34	106,19
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di Bidang Distribusi Obat	88	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase keputusan hasil pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian yang diselesaikan	80	%	84,78	105,98
		Persentase pemenuhan standar pengawasan sarana distribusi dan pelayanan obat oleh Balai	65	%	82,25	126,54
		Persentase Keputusan Penilaian Sarana Distribusi Obat yang Diselesaikan tepat waktu	78	%	84,41	108,22
		Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	4	Indeks	3,90	111,11
		Indek RB Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	90	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	75	indeks	66,66	88,88
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Pengawasan Distribusi dan pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor yang optimal	2	Indeks	0,00	0,00
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran di Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	Efisien (88%)	%	76,00	86,36

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
1.8	Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Indeks Kepatuhan pelaku usaha dalam mutu dan keamanan Obat dan NPP	85	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan iklan obat dan ekspor impor obat, narkotika, psikotropika dan prekursor	85	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Kepatuhan industri Produk Tembakau dalam iklan dan label	46	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Jumlah permohonan ekspor impor obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor yang diselesaikan tepat waktu	13000	permohonan	14.522	111,71
		Persentase permohonan persetujuan iklan obat yang diselesaikan tepat waktu	70	%	97,52	139,31
		Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	3	nilai indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Tingkat Efektivitas KIE di bidang obat	70	nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase laporan Farmakovigilans yang ditindaklanjuti	70	%	73,13	104,48
		Persentase laporan pengawasan mutu, label dan iklan obat dan NPP yang ditindaklanjuti	86	%	51,17	59,50
		Jumlah label dan iklan produk tembakau yang diawasi yang memenuhi ketentuan	50000	label dan iklan	54.011	108,02
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	83	nilai indeks	akhir tahun	akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	75	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif yang optimal	2	Indeks	0,00	0,00
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	Efisien (98%)	%	41,10	41,94
1.9	Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang	Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan pangan olahan	54	%	37,50	69,44
		Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Pengawasan Pangan Olahan sesuai standar	50	Jumlah	18	36,00
		Persentase hasil pengawasan UPT BPOM yang dilakukan sesuai standar	65	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase sarana produksi dan distribusi pangan olahan risiko rendah dan sedang yang dilakukan pendalam mutu, dan memenuhi ketentuan	50	%	55,48	110,96
		Persentase sampel pangan fortifikasi yang diambil dan memenuhi syarat	87	%	85,92	98,76
		Indeks Kepuasan Pelayanan Publik di bidang Pengawasan Pangan Olahan Risiko Rendah dan Sedang	81	%	akhir tahun	akhir tahun
		Jumlah wilayah yang dilakukan pengawasan terpadu lintas sektor	5	Jumlah	akhir tahun	akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	45	%	66,67	148,15
		Persentase keputusan hasil pengawasan risiko rendah dan sedang yang diselesaikan sesuai standar	93	%	100,00	107,53
		Indeks pelayanan publik di Direktorat Pengawasan PRRS	4	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase ketepatan waktu pelayanan publik terkait sarana dan produk pangan risiko rendah dan sedang	89	%	100,00	112,36
		Persentase permohonan ekspor/impor yang diselesaikan tepat waktu	95	%	100,00	105,26
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang	88	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang	75	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang yang baik	2	Indeks	0,00	0,00
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang yang baik	Efisien (92%)	%	80,00	86,96
1.10	Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Persentase sarana produksi obat yang mandiri dalam pemenuhan CPOB	50	%	62,96	125,93
		Persentase fasilitas produksi produk JKN, produk highrisk lainnya, serta bahan baku obat yang diawasi sesuai standar	84	%	60,25	71,72
		Persentase tindak lanjut yang berkualitas dari hasil pengawasan sarana produksi di Balai	90	%	55,56	61,73

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase hasil pengawasan sarana produksi yang ditindaklanjuti	72	%	85,00	118,06
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Publik di bidang pengawasan sarana produksi obat	85	Indeks	85,16	100,19
		Persentase sarana produksi obat JKN, Bahan Baku Obat, dan obat highrisk lainnya yang memenuhi persyaratan CPOB	72	%	90,00	125,00
		Persentase keputusan penilaian fasilitas produksi Bahan Baku Obat, obat, produk biologi, dan sarana khusus yang diselesaikan tepat waktu	65	%	72,65	111,77
		Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	4	Indeks	3,89	110,83
		Persentase tahapan pemenuhan fasilitas produksi obat inovasi atau obat pengembangan baru yang diterbitkan keputusan dalam rangka pengawalan inovasi pengembangan obat	60	%	42,86	71,43
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Produksi ONPP	85	Indeks	81,89	akhir tahun
		Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Produksi ONPP	75	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan NPP yang optimal	2	Indeks	0,25	16,56
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Produksi ONPP	Efisien (95%)	%	95,00	100,00
1.11	Registrasi Pangan Olahan	Persentase pangan olahan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu sebelum diedarkan	80	%	87,18	108,97

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Registrasi Pangan Olahan	86	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase keputusan registrasi pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	78	%	87,00	111,53
		Persentase keputusan registrasi Pangan Olahan yang diselesaikan tepat waktu	95	%	99,90	105,16
		Persentase pengaduan terkait registrasi Pangan Olahan yang ditindaklanjuti	100	%	100,00	100,00
		Indeks Pelayanan Publik di Direktorat Registrasi Pangan Olahan	4	Indeks	4,56	akhir tahun
		Persentase pendampingan di bidang registrasi pangan olahan yang efektif	75	%	89,36	119,14
		Persentase deregulasi dan debirokratisasi di bidang registrasi pangan olahan	20	%	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks RB Direktorat Registrasi Pangan Olahan	91	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi Pangan Olahan	75	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Registrasi Pangan Olahan yang optimal	2	Indeks	0,75	49,67
		Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Registrasi Pangan Olahan	Efisien (96%)	%	78,00	81,25
1.12	Registrasi Obat	Persentase obat yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan	70	%	87,23	124,62
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang registrasi Obat	82	Indeks	82,37	100,45

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase keputusan registrasi obat yang diselesaikan sesuai standar	63	%	75,84	120,37
		Persentase hasil penilaian registrasi obat yang diselesaikan tepat waktu	70	%	85,39	121,99
		Persen pengaduan/keluhan/masukan terkait registrasi Obat yang ditindaklanjuti	100	%	100,00	100,00
		Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Direktorat Registrasi Obat	4	Indeks	3,79	107,98
		Persentase sarana UK/Lab BE yang diinspeksi dan memenuhi CUKB	78	%	54,55	69,93
		Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar registrasi obat	100	%	100,00	100,00
		Indeks RB Direktorat Registrasi Obat	88	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi Obat	75	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Registrasi Obat yang optimal	2	Indeks	0,00	0,00
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Registrasi Obat	Efisien (92%)	%	95,00	103,26
1.13	Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang memenuhi syarat keamanan dan mutu sebelum diedarkan	85	%	86,29	101,52
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang registrasi OT, SK, Notifikasi Kosmetik, Penilaian Uji Pratiklinik/Klinik dan DIP	79	Indeks	81,49	103,15
		Persentase keputusan registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan sesuai standar	68	%	77,69	114,26

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase keputusan ketepatan waktu pelayanan publik dibidang registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Pratiklinik/klinik dan DIP yang diselesaikan tepat waktu	70	%	86,55	123,64
		Persentase pengaduan terkait registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Pratiklinik/ Klinik dan DIP yang ditindaklanjuti	72	%	86,27	119,83
		Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	3	Indeks	3,70	113,50
		Persentase deregulasi dan debirokratisasi di bidang registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Pra Klinik/ klinik dan DIP	20	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase pendampingan di bidang registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Notifikasi Kosmetik, Penilaian Uji Pratiklinik/Klinik dan DIP yang efektif	75	%	87,80	117,07
		Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar di lingkup registrasi obat tradisional	80	%	75,57	94,46
		Indeks RB Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	91	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	75	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kosmetik yang baik	2	%	0,00	0,00

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	Efisien (96%)	%	92,00	95,83
1.14	Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	81	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase kesesuaian perencanaan penyusunan standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sesuai Roadmap	80	%	128,57	akhir tahun
		Persentase standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang disusun dibandingkan dengan yang direncanakan	80	%	133,33	166,67
		Persentase sosialisasi standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik kepada stakeholder yang efektif	85	%	100,00	117,65
		Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, dan khasiat/manfaat Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	85	%	98,75	116,18
		Indeks RB Unit Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	85	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	75	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang optimal	2	Indeks	0,00	0,00

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Efisien (100%)	%	90,00	90,00
1.15	Standardisasi Pangan Olahan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan pangan olahan	71	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	85	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase kesesuaian perencanaan penyusunan standar Pangan Olahan sesuai roadmap	100	%	100,00	100,00
		Persentase standar pangan olahan yang sudah disusun sesuai timeline tahapan penyusunan	91	%	89,74	98,62
		Persentase sosialisasi standar pangan olahan kepada stakeholder yang efektif	88	%	77,59	88,17
		Persentase fasilitasi pengembangan Inovasi makanan melalui standar	72	%	57,50	79,86
		Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, gizi dan manfaat pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu	85	%	99,21	116,71
		Indeks pelayanan publik di bidang standardisasi pangan olahan	4	Indeks	4,21	107,67
		Indeks reformasi birokrasi Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	88	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	75	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Standardisasi Pangan Olahan yang optimal	2	Indeks	0,50	33,11
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	Efisien (100%)	%	75,00	75,00

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
1.16	Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat	71	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase kesesuaian perencanaan penyusunan standar Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif sesuai roadmap	80	%	100,00	125,00
		Persentase standar Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif yang disusun dibanding dengan yang direncanakan	84	%	73,84	87,90
		Persentase sosialisasi standar Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif kepada stakeholder yang efektif	92	%	77,37	84,10
		Indeks RB Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	85	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	75	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif yang optimal	2	Indeks	0,00	0,00
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Efisien (100%)	%	95,00	95,00
		1.17	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	Jumlah UMKM pangan yang sesuai standar	40	UMKM
Persentase Kab/Kota yang menerapkan peraturan keamanan pangan untuk IRTP	30			%	13,00	43,33
Persentase kader/fasilitator keamanan pangan yang berpartisipasi dalam pengawasan Makanan	80			%	26,00	32,50

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Jumlah Kab/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	63	Kab/Kota	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase UPT BPOM yang melakukan pemberdayaan keamanan pangan sesuai Pedoman	80	%	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	84	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Jumlah pelaku UMKM Makanan yang diintervensi keamanan pangan	9000	Jumlah	5.866	65,18
		Jumlah kader/fasilitator yang memahami prinsip keamanan pangan	150	Jumlah	119,00	79,33
		Tingkat efektivitas KIE Makanan	88	nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pelayanan publik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha	3	Indeks	3,80	122,19
		Jumlah pemda yang diintervensi keamanan pangan	100	Prov/Kab/Kota	100	100,00
		Persentase UPT BPOM yang dibina dalam pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha	100	%	100,00	100,00
		Indeks RB Dit PMPU	88	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Dit PMPU	75	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal di Dit. PMPU	2	Indeks	0	0,00
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Dit PMPU	Efisien (90%)	%	95,00	105,56
1.18	Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan	Nilai persentase pemenuhan laboratorium BPOM terhadap standar Kemampuan Laboratorium	71	%	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik di PPPOMN	85	Indeks	akhir tahun	akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase pemenuhan laboratorium BB/BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	70	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan	63	%	61,03	96,87
		Persentase Baku Pembanding yang dikembangkan terhadap kebutuhan	70	%	65,21	93,16
		Persentase alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi terhadap standar	79	%	66,28	83,89
		Persentase sampel Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti tepat waktu	91	%	99,99	109,88
		Indeks Pelayanan Publik PPOMN	4	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase jejaring laboratorium pengujian obat dan makanan yang berpartisipasi aktif	43	%	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks RB PPOMN	91	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai AKIP PPOMN	80	nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN PPOMN	75	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi PPOMN yang optimal	2	Indeks	0,25	16,56
		Nilai Kinerja Anggaran PPOMN	93	nilai	66,13	70,80
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran PPOMN	Efisien (90%)	%	100,00	111,11
1.19	Penyidikan tindak pidana di bidang obat dan makanan	Tingkat Keberhasilan Penyidikan Obat dan Makanan	50	%	34,76	69,52
		Persentase pemenuhan nilai kinerja penyidikan oleh UPT BPOM	70	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase rekomendasi hasil koordinasi lintas sektor di bidang penyidikan yang ditindaklanjuti	70	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase perkara yang meningkat tahapan penyelesaiannya dengan adanya dukungan teknis	45	%	akhir tahun	akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase pendalaman informasi penyidikan yang berhasil menjadi SPDP	50	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase barang bukti yang selesai ditangani sesuai standar	50	%	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks RB Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	85	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks profesionalitas ASN Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	81	Indeks	81,48	100,59
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang optimal	2	Indeks	0,00	0,00
		Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	Efisien (88%)	%	akhir tahun	akhir tahun
1.20	Riset dan kajian di bidang obat dan makanan	Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	72	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase riset dan kajian yang sesuai dengan perencanaan	100	%	91,67	91,67
		Persentase kesesuaian penyelenggaraan riset dan kajian dengan pedoman riset dan kajian dan kesesuaian dengan timeline	80	%	77,00	96,25
		Nilai kualitas publikasi hasil riset dan kajian	70	%	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks RB Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	80	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai AKIP Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	80	nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks profesionalitas ASN Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	75	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi PRKOM yang optimal	2	Indeks	0,25	16,56
		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	93	nilai	50,69	54,51

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Tingkat Efisiensi penggunaan Anggaran Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	Efisien (92%)	%	88,00	95,65
2	Program Dukungan Manajemen	Nilai RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama	41	nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	WTP	opini	WTP	100,00
		Nilai AKIP BPOM di lingkup Sekretariat Utama	73	nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	80	Indeks	85,30	107,30
		Indeks Kepuasan Media	73	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Opini Publik BPOM	66	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase kerjasama yang efektif	82	%	86,47	105,45
		Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	9	nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai Evaluasi Internal Akutabilitas Kinerja BPOM	8	nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase Pemenuhan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Mitra Kerja Inspektorat Utama	3	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditolerans	<1	%	0,06	100,95
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	88	%	93,47	106,22
2.1	Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama Badan POM	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerjasama	4	Indeks	3,82	akhir tahun
		Presentase kerja sama yang ditindaklanjuti atau diimplementasikan	72	%	72,94	101,31

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Jumlah rekomendasi penguatan regulatori yang diterapkan oleh negara penerima KSS Badan POM	2	rekomendasi	2	100,00
		Persentase naskah kerja sama yang diselesaikan tepat waktu	81	%	81,00	100,00
		Jumlah dokumen Kerja Sama Badan POM	84	Dokumen	85,00	101,19
		Jumlah negara selatan-selatan penerima program KSS mengenai penguatan fungsi regulatori	2	negara	2	100,00
		Indeks RB Biro Kerja Sama	85	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Biro Kerja Sama	78	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Kerja Sama	2	Indeks	0	0,00
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Kerja Sama	Efisien (80%)	%	akhir tahun	akhir tahun
2.2	Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan	Nilai RB BPOM Penguatan akuntabilitas	5	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM	73	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) BPOM	93	Nilai	28,85	31,02
		Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) BPOM	94	Nilai	91,89	97,51
		Persentase kesesuaian Laporan Keuangan yang disusun dengan Standar Akuntansi Pemerintahan	100	%	75	75,00
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro Perencanaan dan Keuangan	4	Indeks	3,79	100,00
		Persentase kesesuaian dokumen perencanaan kinerja satker terhadap pedoman	85	%	akhir tahun	akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar	100	%	60	60,00
		Persentase satker yang memperoleh nilai kinerja anggaran minimal 95 berdasarkan mekanisme reward dan punishment berdasarkan mekanisme reward and punishment	21	%	20,9	100,00
		Persentase dokumen penganggaran yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar	100	%	80	80,00
		Persentase laporan capaian kinerja dan anggaran sesuai pedoman	57	%	61,68	108,22
		Persentase dokumen monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu	100	%	80,00	80,00
		Persentase satker yang memperoleh nilai kinerja pelaksanaan anggaran minimal Baik	80	%	55,81	69,77
		Persentase dokumen laporan keuangan satker yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar	100	%	75,00	75,00
		Persentase laporan PNB unit kerja yang disampaikan tepat waktu	95	%	95,35	100,37
		Indeks RB Biro Perencanaan dan Keuangan	85	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Biro Perencanaan dan Keuangan	75	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Perencanaan dan Keuangan yang baik	2	Indeks	0	0,00
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan	Efisien (100%)	Nilai	90	90,00

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
2.3	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan tata laksana	Nilai RB BPOM Penataan peraturan perundang-undangan	3	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai RB BPOM Penataan dan penguatan organisasi	4	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai RB BPOM penataan tata laksana	4	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Pelayanan Publik Biro Hukum dan Organisasi	4	Indeks	3,82	107,61
		Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100	%	100,00	100,00
		Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	79	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan	100	%	76,62	76,62
		Persentase advokasi hukum yang diselesaikan	82	%	93,44	113,95
		Indeks RB Biro Hukum dan Organisasi	91	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN	75	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Hukum dan Organisasi yang optimal	2	%	0,00	0,00
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	Efisien (95%)	Nilai	88,00	92,63
2.4	Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	80	Indeks	85,30	107,30
		Indeks kepuasan media	73	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks opini publik BPOM	66	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro HDSP	4	Indeks	3,63	100,00
		Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	100	Indeks	99,80	100,21

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti	99	%	99,48	100,48
		Tingkat efektivitas KIE obat dan makanan yang dilaksanakan oleh Biro HDSP	73	Indeks	93,43	127,99
		Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Biro Humas dan DSP	4	Indeks	4,48	114,58
		Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan manajemen eselon I	75	Nilai	84,74	112,99
		Indeks RB Biro HDSP	85	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Biro HDSP	75	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Biro HDSP yang optimal	2	Indeks	0,00	0,00
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro HDSP	Efisien (88%)	Nilai	92,00	104,55
2.5	Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM	Nilai RB BPOM Penataan Sistem Manajemen SDM	13	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai Pengelolaan BMN BPOM	80	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	4	Indeks	3,71	100,00
		Persentase ASN BPOM yang memiliki kinerja berkriteria minimal baik	89	%	99,94	112,29
		Persentase ASN BPOM yang ditingkatkan kariernya sesuai pedoman pola karir	73	%	45,56	62,41
		Persentase Satker yang mampu mengelola BMN dengan baik	89	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang kinerja pengawasan Obat dan Makanan sesuai standar	78	%	40,00	51,28

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks RB Biro Umum dan SDM	88	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas SDM Biro Umum dan SDM	75	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Biro Umum dan SDM yang Optimal	2	Indeks	0,00	0,00
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran di Biro Umum dan SDM	Efisien (100%)	Nilai	92,00	92,00
2.6	Pengembangan SDM Aparatur Badan POM	Persentase SDM POM yang memenuhi Standar Kompetensi	75	%	69,27	92,36
		Jumlah SDM pengawas obat dan makanan yang tersertifikasi sesuai Standar	770	SDM	392	50,91
		Nilai RB Badan POM Manajemen Perubahan	4	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM	40	%	77,88	194,71
		Jumlah Kerja Sama Pengembangan Kompetensi yang ditindaklanjuti	10	Dokumen	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai kepuasan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi	4	Nilai	4,51	103,68
		Persentase SDM POM yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan Pengembangan Kompetensi	90	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase realisasi rencana aksi RB Badan POM terkait Manajemen Perubahan	86	%	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks RB PPSDM POM	88	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai AKIP PPSDM POM	81	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM	75	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di PPSDM POM yang optimal.	2	Indeks	0,25	16,56
		Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM	92	Nilai	akhir tahun	akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Tingkat Efisiensi penggunaan Anggaran PPSDM POM	Efisien (90%)	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
2.7	Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan	Indeks SPBE Badan POM	4	Indeks	3,68	96,84
		Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Badan POM	Baseline	%	26,32	26,32
		Indeks Kepuasan Layanan TIK	3	%	3,01	107,50
		Nilai RB Badan POM Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	5	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu	100	%	99,48	99,48
		Persentase Pemenuhan Bussines Continuity Management	15	%	10,00	66,67
		Persentase Kerjasama Sistem TIK yang ditindaklanjuti	100	%	100,00	100,00
		Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Real Time	25	%	80,00	80,00
		Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan Roadmap TIK	100	%	100,00	100,00
		Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir	100	%	55,37	55,37
		Indeks RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	90	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	80	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	75	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal	2	Indeks	0,25	16,56
		Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, dan Data	Baseline	%	23,65	23,65
		Sertifikasi ISO 27001	1	Dokumen	Progres	75,00
		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	93	Nilai	64,87	69,75

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	Efisien (88%)	Nilai	75,00	85,23
2.8	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	9	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai rata-rata evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat I	81	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase Pemenuhan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPOM	40 level 4	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase Pemenuhan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mitra kerja Inspektorat I	100	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase Rekomendasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditindaklanjuti	75	%	akhir tahun	akhir tahun
		Kualitas Laporan Keuangan BPOM Mitra Kerja Inspektorat I	100	%	100,00	100,00
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	88	%	93,47	106,22
		Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Mitra Kerja Inspektorat I	82	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase perencanaan pengawasan intern Inspektorat I berbasis risiko sesuai pedoman	100	%	100,00	100,00
		Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat I yang sesuai standar mutu	22	laporan	16	72,73
		Nilai peer review terhadap pengawasan intern Inspektorat I yang sesuai standar	65	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase rekomendasi Pengawasan intern Inspektorat I yang ditindaklanjuti	90	%	89,20	99,11

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase Hasil Penelusuran Pengaduan Lingkup Inspektorat I yang ditindaklanjuti	60	%	50,00	83,33
		Indeks RB Inspektorat I	91	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalisme ASN Inspektorat I	75	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase ASN Inspektorat I yang memenuhi standar kompetensi	81	%	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat I yang Optimal	2	Indeks	0,00	0,00
		Nilai kinerja anggaran Inspektorat I	92	Nilai	65,31	71,30
		Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat I	Efisien (88%)	%	akhir tahun	akhir tahun
2.9	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	Nilai RB BPOM Penguatan Sistem Pengawasan	10	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai rata rata evaluasi AKIP mitra kerja inspektorat II	81	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase Pemenuhan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mitra kerja Inspektorat II	100	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi lingkup Inspektorat II	<1	%	0,03	3,00
		Indeks kepuasan mitra pengawasan intern mitra kerja inspektorat II	82	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern	80	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat II yang sesuai standar mutu	100	%	100,00	100,00
		Nilai peer review terhadap pengawasan intern Inspektorat II	75	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase rekomendasi pengawasan intern Inspektorat II yang ditindaklanjuti	90	%	87,49	97,21

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase pengaduan lingkup Inspektorat II yang ditindaklanjuti secara tuntas	80	%	100,00	125,00
		Persentase temuan audit internal ISO 9001:2015 yang ditindaklanjuti	100	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase rekomendasi hasil monev pelaksanaan RB BPOM yang ditindaklanjuti	100	%	100,00	100,00
		Persentase rekomendasi hasil revidu PMPRB Unit Kerja Eselon I yang ditindaklanjuti	100	%	100,00	100,00
		Persentase rekomendasi survei integritas organisasi dan jabatan yang ditindaklanjuti	88	%	77,36	akhir tahun
		Indeks RB Inspektorat II	91	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pemenuhan elemen kapabilitas Inspektorat Utama	3	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks profesionalitas ASN Inspektorat II	85	Indeks	75,00	0,00
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat II yang Optimal	2	Indeks	0,00	0,00
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat II	Efisien (88%)	%	75,00	85,23

# LAMPIRAN II

SERAPAN ANGGARAN  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN 2020  
SUMBER: APLIKASI OMSPAN  
(Per 30 September 2020)

## A. Unit Pusat

NO	SATUAN KERJA	PAGU	REALISASI	%
<b>1</b>	<b>432731 - SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN</b>	<b>330.137.708.000</b>	<b>175.955.214.281</b>	<b>53,30%</b>
3158	BIRO KERJASAMA	4.791.449.000	1.809.403.714	37,76%
3159	BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN	15.270.354.000	6.588.571.852	43,15%
4110	BIRO HUKUM DAN ORGANISASI	7.974.034.000	3.850.300.061	48,29%
4111	BIRO HUMAS DAN DUKUNGAN STRATEGIS PIMPINAN	16.111.058.000	6.017.792.742	37,35%
4112	BIRO UMUM DAN SDM	285.990.813.000	157.689.145.912	55,14%
<b>2</b>	<b>445155 - DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF</b>	<b>35.869.588.000</b>	<b>15.475.112.442</b>	<b>43,14%</b>
4122	DIT. PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR	7.626.503.000	3.311.739.926	43,42%
4123	DIT. PENGAWASAN KEAMANAN, MUTU DAN EKSPOR IMPOR OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF	7.101.551.000	2.660.601.828	37,47%
4125	DIT. PENGAWASAN PRODUKSI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR	6.599.298.000	2.652.055.329	40,19%
4127	DIT. REGISTRASI OBAT	7.614.050.000	3.112.693.721	40,88%
4131	DIT. STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF	6.928.186.000	3.738.021.638	53,95%
<b>3</b>	<b>445161 - DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK</b>	<b>28.296.984.000</b>	<b>13.108.977.464</b>	<b>46,33%</b>
4119	DIT. PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN	9.286.165.000	5.003.195.210	53,88%
4121	DIT. PENGAWASAN KOSMETIK	7.063.991.000	2.722.313.348	38,54%
4128	DIT. REGISTRASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK	7.539.900.000	2.908.171.303	38,57%
4129	DIT. STANDADISASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK	4.406.928.000	2.475.297.603	56,17%
<b>4</b>	<b>445170 - DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN</b>	<b>37.857.088.000</b>	<b>15.298.288.870</b>	<b>40,41%</b>
4120	DIT. PENGAWASAN PANGAN RISIKO TINGGI DAN TEKNOLOGI BARU	6.291.542.000	2.475.140.158	39,34%
4124	DIT. PENGAWASAN PANGAN OLAHAN RISIKO RENDAH DAN SEDANG	8.719.090.000	3.386.064.284	38,84%
4126	DIT. REGISTRASI PANGAN OLAHAN	7.359.571.000	2.611.142.163	35,48%

NO	SATUAN KERJA		PAGU	REALISASI	%
	4130	DIT. STANDARISASI PANGAN OLAHAN	6.613.174.000	2.885.308.076	43,63%
	4132	DIT. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA	8.873.711.000	3.940.634.189	44,41%
<b>5</b>	<b>632437 - DEPUTI BIDANG PENINDAKAN</b>		<b>15.512.993.000</b>	<b>7.867.550.823</b>	<b>50,72%</b>
	4117	DIT. PENGAMANAN	4.850.511.000	2.466.152.214	50,84%
	4118	DIT. INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN	5.428.707.000	3.401.588.359	62,66%
	4134	DIT. PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN	5.233.775.000	1.999.810.250	38,21%
<b>6</b>	<b>INSPEKTORAT UTAMA</b>		<b>16.110.999.000</b>	<b>10.400.932.590</b>	<b>64,56%</b>
	4115	INSPEKTORAT I	13.170.745.000	8.933.872.548	67,83%
	4116	INSPEKTORAT II	2.940.254.000	1.467.060.042	49,90%
<b>7</b>	<b>4133</b>	<b>PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL</b>	<b>60.706.414.000</b>	<b>40.817.230.787</b>	<b>67,24%</b>
<b>8</b>	<b>4135</b>	<b>PUSAT RISET DAN KAJIAN OBAT DAN MAKANAN</b>	<b>18.245.125.000</b>	<b>7.621.018.382</b>	<b>41,77%</b>
<b>9</b>	<b>4114</b>	<b>PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN</b>	<b>47.731.519.000</b>	<b>36.926.596.337</b>	<b>77,36%</b>
<b>10</b>	<b>4113</b>	<b>PUSAT PENGEMBANGAN SDM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN</b>	<b>36.363.086.000</b>	<b>19.354.911.547</b>	<b>53,23%</b>
<b>TOTAL SATKER PUSAT</b>			<b>626.831.504.000</b>	<b>342.825.833.523</b>	<b>54,69%</b>

## B. Balai Besar / Balai POM

NO	SATUAN KERJA	PAGU	REALISASI	%
1	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAKARTA	32.626.736.000	20.463.756.386	62,72%
2	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	47.101.471.000	28.883.729.782	61,32%
3	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SEMARANG	47.311.819.000	28.987.400.887	61,27%
4	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN YOGYAKARTA	32.257.207.000	21.769.311.272	67,49%
5	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA	48.786.352.000	27.826.677.795	57,04%
6	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH	31.183.552.000	23.973.305.261	76,88%
7	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MEDAN	36.839.885.000	21.628.261.233	58,71%
8	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PADANG	38.496.037.000	25.371.792.817	65,91%
9	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PEKAN BARU	33.658.631.000	19.966.667.427	59,32%
10	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAMBI	25.447.679.000	14.039.033.595	55,17%
11	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALEMBANG	28.922.452.000	22.376.715.360	77,37%
12	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDAR LAMPUNG	23.759.218.000	15.263.716.585	64,24%
13	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PONTIANAK	25.032.475.000	14.121.218.888	56,41%
14	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALANGKARAYA	23.688.803.000	14.702.195.438	62,06%
15	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANJARMASIN	26.704.835.000	17.575.439.068	65,81%
16	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SAMARINDA	26.316.331.000	16.978.495.404	64,52%
17	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MANADO	31.844.852.000	23.190.231.389	72,82%
18	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALU	21.111.850.000	13.951.963.608	66,09%
19	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAKASSAR	44.216.042.000	26.253.064.994	59,37%
20	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KENDARI	20.249.980.000	13.085.588.493	64,62%
21	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN AMBON	18.700.448.000	12.855.426.357	68,74%
22	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DENPASAR	31.487.620.000	23.824.820.234	75,66%
23	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MATARAM	26.590.742.000	20.782.906.250	78,16%
24	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KUPANG	26.829.797.000	15.278.386.416	56,95%
25	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAYAPURA	28.649.087.000	15.888.470.012	55,46%
26	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BENGKULU	21.587.374.000	13.441.723.042	62,27%
27	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG	26.028.465.000	16.238.483.775	62,39%
28	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM	20.444.169.000	13.314.940.054	65,13%

NO	SATUAN KERJA	PAGU	REALISASI	%
30	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO	14.054.952.000	8.056.019.457	57,32%
31	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MANOKWARI	15.753.844.000	10.124.573.245	64,27%
32	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SOFIFI	10.723.420.000	7.904.973.287	73,72%
33	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAMUJU	14.724.238.000	9.647.211.350	65,52%
<b>TOTAL SATKER DAERAH</b>		<b>917.576.079.000</b>	<b>587.592.622.762</b>	<b>64,04%</b>
<b>TOTAL SATKER PUSAT DAN DAERAH</b>		<b>1.544.407.583.000</b>	<b>930.418.456.285</b>	<b>60,24%</b>



**BADAN POM**

**KINERJA BPOM**

DALAM ANGKA TRIWULAN III TAHUN 2020



Jl. Percetakan Negara  
Jakarta Pusat 10560



[www.pom.go.id](http://www.pom.go.id)



021 4244691



@bpom\_ri



[halobpom@pom.go.id](mailto:halobpom@pom.go.id)



Bpom RI